

**PENELITIAN DOSEN INDIVIDUAL
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN
PADA PENDIDIKAN TINGGI**

**AKTUALISASI NILAI-NILAI SYARIAH
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**



PENELITI

Dr. SUWANDI, M.H.

NIP 196104152000031001

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2015**

**PENELITIAN DOSEN INDIVIDUAL
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN
PADA PENDIDIKAN TINGGI**

**AKTUALISASI NILAI-NILAI SYARIAH
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**



PENELITI

Dr. SUWANDI, M.H.

NIP 196104152000031001

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2015**

**PENELITIAN DOSEN INDIVIDUAL
PENINGKATAN MUTU PENELITIAN DOSEN
PADA PENDIDIKAN TINGGI**

**AKTUALISASI NILAI-NILAI SYARIAH
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**



PENELITI

Dr. SUWANDI, M.H.

NIP 196104152000031001

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG 2015**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN**

Dengan Judul:

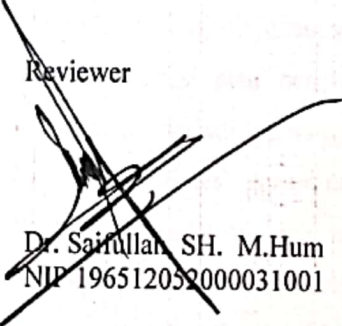
**AKTUALISASI NILAI-NILAI SYARIAH
DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA**

Telah Disahkan Oleh

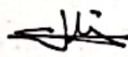
Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal 20 November 2015

Reviewer


Dr. Saifulloh SH. M.Hum
NIP 196512052000031001


Peneliti


Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

Mengetahui,



Ketua Lab. Kajian Syariah,


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag
NIP 197511082009012003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Peneliti : Dr. Suwandi, M.H.
NIP : 196104152000031001
NIDN : 2015046101
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tk.I - III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi
Jurusan/Program Studi : Hukum Bisnis Syariah
Unit Kerja : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

Penelitian yang diajukan adalah karya sendiri, tidak pernah/sedang diteliti, bukan skripsi, tesis, disertasi atau penelitian dari sumber pendanaan lain. Apabila di kemudian hari diketahui terjadi pelanggaran terhadap syarat tersebut, maka peneliti bersedia bertanggungjawab sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen Fakultas Syariah 2015.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 20 November 2015



Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Peneliti : Dr. Suwandi, M.H.
NIP : 196104152000031001
NIDN : 2015046101
Pangkat, Golongan Ruang : Penata Tk.I - III/d
Jabatan Fungsional : Lektor
Bidang Keahlian : Hukum Ekonomi
Jurusan/Program Studi : Hukum Bisnis Syariah
Unit Kerja : Fakultas Syariah UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang

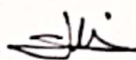
Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami TIDAK SEDANG TUGAS BELAJAR;
2. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa kami sedang tugas belajar, maka secara langsung kami menyatakan mengundurkan diri dan mengembalikan dana yang telah kami terima dari Program Peningkatan Mutu Penelitian Dosen Fakultas Syariah 2015.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat sebagaimana mestinya.

Malang, 20 November 2015

Peneliti,



Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

ABSTRAK

Suwandi, Aktualisasi Nilai-nilai Syariah dalam Perekonomian Indonesia.
Kata Kunci: Aktualisasi Nilai-nilai Syariah, Perekonomian Indonesia.

Ekonomi syariah dalam sejarah perkembangan hukum Indonesia keberadaannya masih relatif muda. Baru sekitar tahun 2008 dengan lahirnya Undang-undang No. 21 tentang Perbankan Syariah, ekonomi syariah baru mulai dikenal di Indonesia. Dengan kenyataan ini berarti perekonomian Indonesia sebelumnya masih didominasi oleh perekonomian konvensional. Artinya nilai-nilai syariah belum terakomodir dalam konsep hukum perekonomian sekalipun perkataan syariah sudah populer di kalangan umat Islam.

Untuk itulah maka penelitian hukum normatif yang bertema aktualisasi nilai-nilai syariah dalam perekonomian Indonesia ini menitikberatkan perhatiannya pada pembahasan bagaimana aktualisasi nilai-nilai syariah ke dalam perekonomian Indonesia?, agar aktualisasi nilai-nilai syariah tersebut benar-benar diketahui implementasinya dalam konteks hukum ekonomi Indonesia.

Hasil pembahasan menyimpulkan bahwa nilai konstitutif hukum ekonomi syariah dikolaborasi dengan nilai konstitutif hukum ekonomi konvensional tanpa memandang tempat dan waktu di mana hukum ekonomi tersebut diimplementasikan. Sedangkan nilai-nilai regulatif bersifat luwes dalam arti ketergunaannya menyesuaikan dengan ruang dan waktu di mana hukum ekonomi tersebut diimplementasikan. Secara rinci nilai-nilai syariah tersebut harus tertuang dalam substansi hukum, lembaga hukum, dan budaya hukumnya.

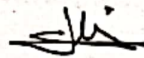
KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa Syukurulillah, dari lubuk hati yang sangat dalam, penulis sampaikan puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan hidayah serta pertolongan-Nya, hingga penulis diberi kesempatan, kemampuan, dan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian ini, dalam rangka penambahan wawasan keilmuan dalam bidang hukum ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai syariah. *Shalawat* dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW., yang telah memberikan bimbingan kepada umatnya menuju kebahagiaan abadi, lahir-batin, dunia dan akhirat.

Penelitian ini menyajikan tema pokok Aktualisasi Nilai-nilai syariah dalam Perekonomian Indonesia, dengan harapan perekonomian Indonesia ke depan memiliki legalitas syariah sehingga dapat memenuhi harapan umat Islam sebagai pemeluk agama terbanyak.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa di dalam tulisan ini masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan yang bersumber dari kemampuan penulis sendiri. Menyadari akan hal tersebut, penulis mengharapkan adanya lontaran saran dan kritik yang *konstruktif* demi kesempurnaan tulisan ini di masa mendatang.

Malang, 20 Oktober 2015
Penulis,



Dr. Suwandi, M.H.
NIP 196104152000031001

DAFTAR ISI

| | Hal. |
|---|------|
| BAB I Pendahuluan..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 4 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 4 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 5 |
| F. Metode Penelitian..... | 5 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 5 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 8 |
| 3. Jenis Bahan Hukum dan Metode Pengumpulannya..... | 8 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data..... | 10 |
| 5. Analisis Bahan Hukum..... | 10 |
| G Sistematika Penulisan..... | 11 |
| BAB II Kerangka Konsep dan Teoritis..... | 14 |
| A. Penelitian Tedahulu..... | 14 |
| B. Hukum dan Ekonomi Sebagai Mobilitas Kemajuan Bangsa..... | 15 |
| C. Konsep Nilai..... | 20 |
| D. Konsep Nilai dalam Perspektif Syariah | 28 |

| | |
|--|--------|
| BAB III Nilai-nilai syariah dalam sistem perekonomian Indonesia..... | 55 |
| A. Momentum Persaingan Sistem Ekonomi di Indonesia..... | 55 |
| B. Pemanfaatan Momentum Persaingan Politik Ekonomi | 61 |
| C. Aktualisasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Perekonomian Indonesia | 64 |
| BAB IV Penutup..... | 72 |
| A. Kesimpulan | 72 |
| B. Saran | 72 |

Pedoman Transliterasi

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|-------|------|-------|
| ا | â | ط | th |
| ب | b | ظ | zh |
| ت | t | ع | ' |
| ث | s | غ | gh |
| ج | j | ف | f |
| ح | h | ق | q |
| خ | kh | ك | k |
| د | d | ل | l |
| ذ | dz | م | m |
| ر | r | ن | n |
| ز | z | و | w |
| س | s | ه | h |
| ش | sy | ء | a |
| ص | sh | ي | y |
| ض | dl | | |

B. Madd dan Diftong

| Arab | Latin | Arab | Latin |
|------|---------------|------|-------|
| آ | â (a panjang) | أَوْ | aw |
| إِئ | î (i panjang) | أَي | ay |
| أُو | û (u panjang) | | |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perekonomian adalah sebagai tonggak kehidupan, baik secara individual maupun kolektif. Kolektif, dalam arti kelompok masyarakat tertentu maupun dalam arti Negara. Bahkan ukuran majunya sebuah Negara bisa dilihat dari sudut pandang tingkat kemajuan perekonomian rakyatnya. Semakin tinggi tingkat perekonomian rakyatnya berarti semakin maju pula negaranya. Perlu diketahui bahwa kemajuan ekonomi sebuah Negara tidaklah dengan serta merta begitu saja terwujud. Kemajuan ekonomi biasanya berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Semakin besar kebutuhan masyarakat berarti semakin memicu perkembangan di bidang perekonomian. Dengan demikian tidaklah bisa dipungkiri bahwasanya penambahan penduduk juga ikut andil akan adanya sebuah perkembangan perekonomian suatu Negara. Secara alamiah sesuatu itu menjadi besar karena berawal dari kecil kemudian mengembang dan akhirnya berubah menjadi besar. Begitu juga perekonomian, akan tetapi berkembangbesarnya perekonomian ini tentu saja harus melalui segala cara khususnya cara edukasi atau pembelajaran kepada seluruh masyarakat melalui pendidikan, sekalipun dikatakan bahwa pelajaran ekonomi itu mengajarkan kerakusan.¹

¹ Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas), hal.22.

Tatkala perekonomian itu sudah menemukan bentuknya sebagai sesuatu yang besar, tentu saja hal tersebut banyak memicu adanya *disorder* atau ketidakteraturan. Ketidakteraturan itu muncul karena bertemunya berbagai kepentingan dalam rangka memenangkan persaingan ekonomi yang keseluruhannya berkeinginan untuk menjadi pemenangnya. Persaingan berawal dari munculnya keinginan para pelaku pasar tanpa melihat identitas yang melekat padanya. Siapa saja yang kuat merekalah yang menjadi pemenang dan akhirnya bertindak sebagai penguasa pasar.

Sebuah kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri oleh siapaun bahwa dalam kaitannya dengan perekonomian sebuah Negara, faktor ideologi merupakan basis yang menjadi sumber bagaimana perekonomian menjadi pola dan berkembang secara konsisten mempengaruhi dan mewarnai pembangunan. Sudah barang tentu keikutsertaan ekonomi dalam pembangaunan tersebut pasti harus didahului dengan pembangunan perekonomian itu sendiri. Karena kekuatan ekonomi itulah sesungguhnya yang menjadi tiang penyanggah berdirinya suatu entitas lainnya, termasuk di dalam hukum yang diharapkan menjadi panglima demi mempertahankan martabat suatu bangsa dan negara sekaligus dicirikan sebagai Negara berwibawa baik secara intern masyarakatnya sendiri maupun ekstern dunia internasional. Dunia mewariskan beberapa pilihan ideologi besar yang sudah teruji disertai pula adanya pengikut yang konkret, yaitu ideology liberalisme, sosialisme, dan ideology Islam². Sesuai dengan namanya, liberalisme lebih mengedepankan kebebasan dari pada

² H.M. Arifin Hamid, 2007, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospeknya*, (Bogor: Galia Indonesia), hal. 2.

unsur-unsur lainnya seperti kebersamaan dalam meningkatkan kesejahteraan. Dengan kebebasan itulah aliran ini sangat berambisi menguasai pasar sebagai kekuatannya (*market power*). Pada taraf tertentu, kekuatan pada pasar tersebut bukan hanya mempengaruhi pasar secara praktis, namun juga berpengaruh secara normatif dalam memaknai suatu kebebasan usaha³. Lain halnya dengan sosialisme, aliran ini lebih mengedepankan kebersamaan dari pada kebebasan sebagaimana liberalisme. Kepemilikan bersama sangat dijunjung tinggi sekalipun dalam hal-hal tertentu justru mencederai hak-hak asasi manusia. Manusia memiliki hak-hak yang melekat dalam kehidupannya termasuk memiliki harta sepanjang tidak bertentangan dengan norma-norma yang mengatur kebebasan orang lain. Itulah sebabnya aliran sosial ini semakin lama semakin melemah dan ditolak oleh banyak Negara. Berbeda dengan ideology Islam, sistem ekonominya justru meletakkan kesejahteraan individu sebagai konstruksi kesejahteraan public. Dari sinilah lahir perintah-perintah tentang wakaf, shodaqah, infak, maupun zakat. Kesemuanya itu diwujudkan dalam rangka tanggungjawab social sebagai hamba Allah SWT.

Persaingan dengan sistem ekonomi lainnya secara kultural selalu memberikan pengaruh yang terkadang secara positif dan terkadang pula secara negatif. Pengaruh sistem ekonomi lainnya terhadap ekonomi Islam ini bisa berpotensi tidak terakomodirnya nilai-nilai kesyariahan yang semestinya menjadi ciri kekhususannya. Liberalisasi ekonomi sebagaimana agenda reformasi Indonesia di atas sungguh

³ Vegitya Ramadhani Putri, *Hukum Bisnis Konsep dan Kajian Kasus Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia*, Uni Eropa, dan Amerika Serikat, 2003, (Malang: Setara Press), hal. 1.

menjadi pemicu tidak terakomodirnya ataupun hilangnya nilai-nilai syariah dalam system ekonomi Syariah itu sendiri. Untuk itulah upaya keras dan serius harus selalu diwujudkan dalam bentuk kajian-kajian, penelitian maupun sosialisasi agar nilai-nilai kesyariahan tersebut bisa terinternalisasi ke dalam ekonomi syariah. Ekonomi syariah sebagai kebanggaan umat Islam Indonesia bias mewarnai system perekonomian Indonesia dalam system hukum Pancasila. Untuk itulah penelitian ini diangkat dengan tema atau judul “Internalisasi nilai-nilai syariah pada ekonomi Indonesia dalam kontes ekonomi Pancasila”.

B. Rumusan Masalah

Hukum sebagai dasar pijakan perekonomian syariah dalam kaitannya dalam konteks Negara sebagaimana dipaparkan pada latar belakang di atas, masih menunjukkan adanya problem, khususnya yang berkaitan dengan nilai-nilai kesyariahan. Secara teoritis nilai-nilai syariah tersebut sesungguhnya telah ada dan melekat pada ekonomi syariah itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana nilai-nilai tersebut bias terinternalisasi dalam kontes Negara. Untuk itu penelitian ini dilakukan dalam menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan bagaimana aktualisasi nilai-nilai syariah ke dalam perekonomian Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab permasalahan yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai syariah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam bentuk

perumusan masalah untuk mengetahui bagaimana aktualisasi nilai-nilai syariah dalam perekonomian Indonesia?

D. Manfaat penelitian.

1. Secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi pemikiran pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan internalisasi nilai-nilai syariah ke dalam perekonomian Indonesia khususnya dalam konteks hukum ekonomi Pancasila, serta melengkapi bahan studi penelitian hukum ekonomi syariah, baik berupa perbendaharaan konsep, metode, teori ataupun pengembangan wacana ilmiah (*scientific discourse*) sebagai wawasan baru dalam *khazanah* perubahan dan pembangunan hukum.
2. Memberikan sumbangan pemikiran atau masukan (*input*) ataupun rekomendasi kepada pemerintah. Baik lembaga eksekutif maupun legislatif dalam upaya penyempurnaan dan perbaikan konsep serta regulasi dengan memasukkan nilai-nilai syari'ah dalam ekonomi Indonesia.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan karakter *preskriptifnya*,⁴ ilmu hukum merupakan sesuatu yang sangat *subtansial* yang dengannya ilmu hukum diharapkan mampu merespon

⁴ Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, ilmu hukum diperuntukkan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas

persoalan-persoalan kehidupan meskipun telah ada norma-norma selainnya seperti norma moral, norma susila, norma agama, dan sebagainya. Terry Hutchinson dalam Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa penelitian hukum terdiri dari beberapa tipologi, yaitu *doctrinal research*, *reform-oriented research*, dan *theoretical research*.⁵ Beberapa jenis penelitian tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Terry Hutchinson menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebenarnya merupakan penelitian yang bersifat doktrinal karena karakter *preskriptif* dalam keilmuan hukum.⁶ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji⁷ metode penelitian hukum dengan obyek kajian penelitian terhadap azas-azas hukum adalah penelitian terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas. Penelitian tersebut dapat dilakukan (terutama) terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, sepanjang bahan-bahan tadi mengandung kaidah-kaidah hukum. Penelitian terhadap azas-azas hukum merupakan suatu penelitian filosofis, oleh karena azas hukum merupakan unsur ideal dari hukum. Penelitian azas-azas hukum dapat pula dilakukan dalam bidang hukum tidak tertulis, yakni hukum adat. namun karena penelitiannya merupakan penelitian kepustakaan, maka yang dianalisa adalah hukum adat tercatat atau hukum adat yang didokumentasikan.

aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sedangkan ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Sifat ilmu hukum sebagai ilmu terapan merupakan konsekuensi dari sifat *preskriptifnya*, yakni penerapan yang akan berpengaruh terhadap sesuatu yang bersifat *substansial*.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005), hal. 32-33

⁶ *Ibid*, hal 33.

⁷ Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press), hal 51-79.

Penelitian yang berjudul "Aktualisasi Nilai-nilai Syariah dalam Perekonomian Indonesia", adalah termasuk dalam tipologi penelitian hukum normatif, yaitu sebuah upaya dalam meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencoba menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Selain itu penelitian hukum normatif juga bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan perkembangan (dinamika) internal pengaturan hukum.⁹ Penelitian hukum normatif ini menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji dapat dikatakan juga sebagai penelitian hukum kepustakaan yang bisa disejajarkan dengan istilah *legal research* atau *legal research instruction*.¹⁰

Dipilihnya jenis metode penelitian hukum normatif ini, bertitik tolak dari sebuah pemikiran tentang adanya asumsi bahwa sekalipun aturan hukum ekonomi Indonesia relatif sudah tertata begitu rapi, dan baik, namun ketika melihat perkembangan hukum ekonomi di Indonesia itu sendiri dirasa belum terlihat mengakomodir nilai-nilai kesyariahan sebagai basis ekonomi masyarakat, padahal penduduk Indonesia mayoritasnya memeluk agama Islam. Maka dilakukannya penelitian ini diharapkan memberikan landasan normatif pelaksanaan perekonomian berbasis syariah sesuai dengan rasa hukum kebanyakan masyarakat Indonesia itu sendiri.

⁸ Johny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing), hal. 57.

⁹ Soerjono soekanto & Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta, Rajawali Press), hal. 27.

¹⁰ *Ibid*, hal 27

2. Pendekatan Penelitian

Bertolak dari pemikiran dan pemahaman terhadap isu-isu hukum dalam sistem hukum positif (positivisme hukum) dan hukum Islam (syariah) khususnya dalam persoalan nilai-nilai kesyariahan sebagai bahan kajian oleh para pakar, maka pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan peraturan perundangan (*statute approach*).¹¹ Pendekatan analisis konsep hukum (*analytical conceptual approach*), yaitu dengan cara melakukan pendekatan terhadap pengertian atau konsep nilai-nilai kesyariahan dalam kaitannya dengan aktualisasinya ke dalam konteks hukum ekonomi Indonesia. Sedangkan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan jalan mengkaji regulasi-regulasi yang berkaitan dengan ekonomi syariah (Islam) sebagai bagian dari sistem perekonomian yang dikaitkan dengan konteks keindonesiaan.

Mengacu pada jenis dan pendekatan tersebut, maka diharapkan penelitian ini mampu menjelaskan secara analitik dan obyektif atas permasalahan yang diangkat.

3. Jenis Bahan Hukum dan Metode Pengumpulannya

Bahan hukum merupakan hal yang sangat esensial, bahkan merupakan inti dari sebuah penelitian yang termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif. Tanpa adanya bahan hukum yang berupa aturan perundang-undangan mustahil sebuah

¹¹ Philipus Mandiri Hadjon, "Pengkajian Ilmu Hukum, dalam Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif", Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1-1 Juni 1997.

penelitian hukum normatif dapat dilaksanakan. Bahan hukum yang dijadikan bahan kajian dalam penelitian ini sebagaimana dijelaskan pada ulasan sebelumnya dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer diperoleh dari sumber yang mengikat yang secara khusus berupa penjelasan tentang nilai-nilai, baik pada hukum umum maupun hukum ekonomi syariah yang secara tekstual tersebar pada buku-buku tentang ilmu hukum maupun ekonomi syariah. Oleh karena itu sumber hukum primer ini bisa berupa al-Qur'an, al-Hadits, buku-buku fikih muamalah klasik maupun kontemporer, serta fatwa-fatwa ulama' yang secara spesifik membahas nilai-nilai kesyariahan.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang dimaksudkan di sini adalah bahan hukum yang secara literal memberikan dukungan dan penjelasan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut bisa berupa buku, jurnal, makalah, artikel, internet, dan lain sebagainya sepanjang berkaitan dengan tema penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Adapun yang dimaksudkan dengan bahan hukum tersier di sini adalah kamus dan ensiklopedi yang berfungsi memberikan penjelasan arti secara harfiah, baik yang berkaitan dengan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

Upaya pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini dilakukan prosedur-prosedur sebagai berikut:

- a. Penelusuran terhadap bahan hukum primer berupa kajian tentang nilai-nilai khususnya nilai kesyariahan baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang lainnya.
- b. Penelusuran bahan kepustakaan atau bahan hukum sekunder, yang terdiri dari kitab-kitab fikih, buku, karangan ilmiah, jurnal, internet dan pendapat para ahli hukum yang membahas nilai-nilai khususnya nilai kesyariahan.
- c. Penelusuran bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier ini dapat berupa kamus maupun ensiklopedia.

5. Analisis Bahan Hukum

Sesuai dengan karakter penelitian hukum normatif, maka dalam penelitian ini akan dilakukan analisis terhadap bahan hukum sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Bahan hukum yang telah dikumpulkan akan dianalisis secara diskriptif analisis evaluatif, interpretatif, dan secara sistematis berdasarkan argumentasi hukum dalam rangka mendapatkan hasil analisis yang bisa dipertanggungjawabkan.

F. Sistematika Penulisan

Penyajian dalam penelitian ini memuat beberapa bab, antara satu dengan yang lainnya memiliki kesinambungan. Keterkaitan bab satu dan bab-bab berikutnya secara instrumental dan berurutan merupakan kesinambungan pemikiran dalam rangka mencapai tujuan yang direncanakan.

Bab I berupa latar belakang masalah yang menguraikan adanya isu-isu hukum tentang aktualisasi nilai-nilai kesyariahan ke dalam perekonomian Indonesia. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Fokus penelitian (rumusan masalah) yang menjadi pijakan kajian penelitian ini merupakan isu hukum yang secara yuridis normatif menimbulkan pertanyaan tentang adanya aktualisasi nilai-nilai kesyariahan dalam ekonomi Indonesia, yang sedang menjadi bahan kajian di banyak kalangan pakar hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu kajian ini diharapkan dapat memberikan kepastian hukum yang adil dan kepastian yang adil dalam konteks hukum Indonesia. Tujuan penelitian disajikan dalam bab ini untuk mengetahui sasaran apa yang hendak dicapai.

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah: *Pertama*, secara teoritis memberikan kontribusi pemikiran pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan nilai-nilai kesyariahan pada khususnya, serta melengkapi bahan studi penelitian hukum dalam bidang ekonomi syariah, baik berupa perbendaharaan konsep, metode, teori ataupun pengembangan wacana ilmiah (*scientific discourse*) sebagai wawasan

baru dalam *khazanah* perubahan dan pembangunan hukum ekonomi syari'ah. Kedua, memberikan sumbangan pemikiran atau masukan (*input*) ataupun rekomendasi kepada pemerintah. Baik lembaga eksekutif maupun legislatif dalam upaya penyempurnaan dan perbaikan konsep serta regulasi ekonomi syari'ah di Indonesia. Berdasarkan masukan tersebut diharapkan terwujudnya bangunan ekonomi syari'ah yang utuh dan kokoh, mengakomodir nilai-nilai syari'ah secara benar dan sesuai dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum yang *syar'iyah*¹² dalam sistem hukum nasional (Pancasila).

Orisinalitas disajikan untuk memberi informasi bahwa penelitian mengenai aktualisasi nilai-nilai syariah ini merupakan karya asli yang belum pernah diteliti oleh siapapun dan di manapun.

Metode penelitian yang dipergunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dipergunakannya metode penelitian hukum normatif ini bertitik tolak dari fokus penelitian (rumusan masalah) yang dipilih yang dalam kenyataannya memiliki signifikansi atau kesesuaian. Bab ini diakhiri dengan memaparkan sistematika penelitian guna memberikan informasi awal tentang tata urutan pembahasan yang dilakukan.

Bab II, dalam penelitian ini menyajikan kerangka teoritik yang di dalamnya membicarakan teori-teori yang dipergunakan untuk menganalisis setiap

¹² . Arti *syar'iyah* di sini adalah menunjukkan sifat yang melekat pada yang disifati, sehingga maknanya adalah perbankan syariah yang benar-benar sesuai dan memiliki sifat syariat Islamiyah yang sesungguhnya.

permasalahan-permasalahan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku tentang nilai-nilai syariah, baik hukum nasional maupun hukum Islam yang telah ditentukan. Kerangka konsep penelitian juga dibahas dalam bab ini guna menjelaskan kata-kata di dalam judul yang dirasa sulit dan memang memerlukan penjelasan, sesuai dengan yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

Bab III, merupakan kajian berdasarkan permasalahan yang ditetapkan dalam fokus penelitian (rumusan masalah). Bab ini membahas dan menganalisis permasalahan penelitian yang berkaitan dengan internalisasi nilai-nilai kesyariahan pada perekonomian Indonesia.

Bab IV, menyajikan kesimpulan berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dilakukan serta rekomendasi kepada pihak-pihak yang berkaitan.

BAB II

KERANGKA KONSEP DAN TEORITIS

A. Penelitian Terdahulu:

Sepanjang penelusuran yang dilakukan, belum didapatkan sebuah penelitian yang fokus bahasannya mengenai internalisasi nilai-nilai syariah ke dalam konteks hukum ekonomi Indonesia, kecuali sedikit pembahasan dalam bentuk sub bahasan yang terdapat dalam buku maupun penelitian yang dilakukan oleh Elfina Yenti. Buku tersebut ditulis oleh Arifin Hamid dengan judul: "Hukum ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Di Indonesia"¹. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Elfina Yenti, dengan judul Pengaruh Pemahaman Nilai-nilai syariah terhadap Perilaku Bisnis Pedagang Minang pada Pasar Aur Kuning Bukit Tinggi. Penelitian ini tergolong penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pemahaman nilai-nilai syariah terhadap perilaku bisnis Pedagang Minang pada Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Metode yang digunakan adalah kuesioner, di mana hasil atau data yang didapatkan dianalisis dengan menggunakan alat analisis Korelasi *Product Moment* dari Karl Pearson dan *regresi linear*. Uji korelasi dilakukan untuk melihat pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil analisis yang didapat dari penelitian ini menunjukkan terdapatnya pengaruh positif antara pemahaman nilai-nilai syariah dengan perilaku bisnis Pedagang Minang pada Pasar Aur Kuning.

¹ Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) Aplikasi dan Perspektifnya*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), hal 25-87.

Berdasarkan alin penelusuran tersebut, peneliti memastikan bahwa penelitian yang dilakukan ini adalah murni penelitian sendiri dan belum ada seorangpun yang meneliti dalam tema atau judul yang sama.

B. Hukum dan Ekonomi Sebagai Mobilitas Kemajuan Bangsa.

Ketika sebuah negara dinyatakan merdeka, maka secara *defakto* dan *dejure* ia berhak menentukan kedaulatan dan kebebasannya sendiri dalam segala hal yang berkaitan dengan nasib rakyatnya. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan momentum bersejarah bagi bangsa Indonesia untuk memproklamirkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Artinya mulai saat itulah Indonesia memasuki babak baru dan bebas menentukan segala kebijakan ke arah mana bangsa dan negara ini akan dibawa. Itu semua dimaksudkan agar negara secara bebas dan mandiri dapat menjadikan rakyatnya hidup dalam keadaan aman, tenteram, serta sejahtera dan bisa berpartisipasi aktif mengisi kemerdekaan demi kemajuan bangsa dan negara tanpa intervensi pihak lain. Tidak pelak lagi perekonomian merupakan tonggak atau tiang penyanggah yang paling utama di samping sistem hukum yang mengatur pranata kehidupan berbangsa, bernegara, dan bertanah air. Hukum dan ekonomi secara bersamaan bekerja memobilisasi pergerakan kehidupan bangsa dalam rangka mewujudkan negara yang aman sentausa, serta adil dan makmur. Hukum dan ekonomi merupakan tolok ukur yang paling mudah untuk mengatakan apakah sebuah negara itu bisa dikatakan makmur, sejahtera, serta stabilitas kehidupan terjaga.

Sejalan dengan hal tersebut, agenda utama reformasi Indonesia mencanangkan tiga hal penting yang harus terelesaikan demi mewujudkan harapan bangsa. Ketiga hal tersebut adalah pembaruan hukum (*legal reform*), demokrasi (*democracy*), dan liberalisasi ekonomi (*economic liberalization*)². Hukum dan ekonomi memiliki hubungan jalin-kelindan dalam memberikan kontribusi kemajuan bangsa dan negara. Tom Ginsburg dalam tulisannya yang berjudul *Does Law Matter for Economic Development? Evidence from East Asia*, sebagaimana dikutip oleh Jimly Asshiddiqie menyatakan “karena pentingnya persoalan hubungan antara hukum dan pembangunan ekonomi inilah, menurutnya, maka pada tahun 1970-an berkembang apa yang dinamakan sebagai *Law and development movement*, yaitu suatu gerakan pemikiran yang menganjurkan agar hukum dilihat sebagai *a tool of social change*, sebagai sarana perubahan masyarakat³.

Globalisasi yang merambah dan masuk ke relung-relung kehidupan bangsa dan negara, kini menjadi sentral perhatian banyak kalangan. Hal tersebut terjadi karena tidak mungkin sebuah negara hidup secara mandiri tanpa harus berinteraksi dengan negara lain. Terpaksa atau tidak, sebuah negara harus mampu menjalin hubungan dengan negara-negara lainnya dalam upaya menyetarakan kesejahteraan rakyatnya, paling tidak jangan sampai terjadi kesenjangan terlalu jauh dengan negara lainnya. Dalam konteks inilah ekonomi dan hukum menjadi instrument yang sangat penting dan diharapkan kiprahnya untuk mewujudkan

² Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas), hal. 15.

³ Jimly, hal 13.

harapan bangsa dan negara tersebut. Sebagaimana dituturkan pada latar belakang masalah, bahwa secara faktual dunia ini mewariskan tiga aliran ideologi besar yang pada gilirannya akan membentuk sebuah komunitas yang besar pula untuk mewarnai gerak langkah sebuah negara ke mana ia akan dibawa dan diarahkan. Setiap ideologi dari ketiga ideologi besar tersebut bekerja keras untuk menundukkan lawan-lawannya sebagai *competitor* yang dianggap sebagai perongrong dan penghalang tercapainya cita-cita menguasai ideologi negara.

Ideologi liberalis-kapitalis dengan berbagai teori dan pengalamannya yang panjang tentu tampil lebih elegan dan memiliki daya tarik yang sangat memukau seluruh lapisan masyarakat yang pada akhirnya hampir seluruh sektor kehidupan dapat diatur dan dikendalikan dengan pola ekonomi liberal-kapitalistik tersebut. Hal demikian itu tidaklah muncul dengan tiba-tiba di negara Republik Indonesia ini, melainkan perjalanan panjang nasib bangsa Indonesia yang relatif sangat lama hidup dalam kendali penjajah yang notabenenya membawa konsep ideologi kapitalis dengan dipandu oleh hukum sipil dari Eropa *continental* yang terkenal dengan *Civil Law System*-nya. Sebagai rakyat jajahan, bangsa Indonesia saat itu tidak memiliki pilihan dan kemampuan apapun kecuali tunduk dan patuh melaksanakan ideologi yang sungguh bertentangan dengan nurani bangsa saat itu, sekalipun secara teoritis hal itu bertentangan dengan keilmuan hukum itu sendiri. Karena menurut madzhab sejarah, hakekat hukum itu sesungguhnya perilaku sosial yang terlembagakan, eksis

sebagai variabel sosial empirik⁴. Pernyataan ini dipekuat oleh pendapat Frederich Karl Von Savigny (pelopor madzhab sejarah), menyatakan “hukum tidak ditetapkan/dibuat oleh pemerintah (pihak penguasa atau otoritas) tetapi tumbuh sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang analog dengan perkembangan kebudayaan, bahasa, dan adat-istiadat masyarakat.”⁵ Fakta sosial yang terjadi di Indonesia saat dalam cengkeraman penjajah, sekalipun sesungguhnya bangsa Indonesia sudah memiliki corak perilaku sendiri, akan tetapi layaknya bangsa terjajah haruslah tunduk pada kekuasaan yang ada pada saat itu.

Perlu disadari, walaupun arus globalisasi yang secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai gelombang sunami yang berpotensi membahayakan perekonomian nasional, tetapi sebenarnya ia juga bisa dilihat dari sudut pandang yang positif yaitu “mempunyai nilai manfaat yang lebih tinggi bagi kehidupan yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama”⁶. Bertitik tolak dari pemikiran yang demikian, Indonesia bisa memanfaatkan momentum ini dalam rangka menciptakan masyarakat yang adil dan makmur yang dilengkapi dengan perangkat hukum yang memadai sehingga bisa memberikan perlindungan bangsa dan seluruh tumpah darah secara aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kejadian bersejarah berjalan dengan pastinya di masa yang begitu panjang, di mana ideologi-ideologi ekonomi bersaing secara ketat untuk menguasai sistem ekonomi suatu negara. Indonesia yang tidak bisa terlepas dari

⁴ I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press), hal. 13.

⁵ I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, hal.13.

⁶ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju), hal.3.

sasaran tersebut bahkan sudah dibuktikan oleh sejarah panjang hidup dalam cengkeraman penjajah, ketiga ideologi ekonomi tersebut berperang untuk memenangkan persaingan.

Ideologi terbesar yang berada pada suatu negara keberadannya selalu berorientasi kepada negara tersebut, terlepas ia sebagai ideologi penguasa atau bukan, apa lagi jika memang merupakan ideologi yang dianut oleh pemegang kekuasaan. Tujuannya adalah ingin mewarnai ideology Negara agar kebijakan Negara selalu berorientasi dengan system ideology yang ditawarkan, tanpa memandang system hukum yang dianut oleh Negara yang bersangkutan. Oleh karena itu, Indonesia yang faktanya adalah negara hukum, tidak terlepas dari sasaran ideology-ideologi besar tersebut. Hanya saja Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia dengan sila pertamanya jelas menunjukkan penghargaan yang sangat tinggi terhadap agama, bahkan tidak membenarkan seorangpun dari warga negaranya yang tidak menganut suatu agama. Artinya Indonesia memang bukan negara agama, akan tetapi sangat konsen terhadap agama. Dengan demikian agama merupakan basis kehidupan yang mewarnai substansi hukum sebagai pranata kehidupan dalam kerangka negara. Yang demikian itu karena hukum itu sejatinya adalah jiwa bangsa di mana kontribusi agama sangat kuat sekali membentuk karakter seluruh warga masyarakatnya. Karakter merupakan faktor dominan dalam terwujudnya perilaku masyarakat dalam berbagai aspek, termasuk aspek perekonomian yang merupakan aktifitas pokok bahkan terbesar yang terdapat pada kehidupan bermasyarakat. Jika kontribusi agama membentuk karakter, dan karakter merupakan faktor dominan dalam terwujudnya

perilaku masyarakat, maka dapat disimpulkan bahwa agama adalah faktor terpenting dalam perekonomian itu sendiri dan bahkan juga hukum yang berstatus sebagai pranata regulasi yang diberlakukan. Di lain pihak, perkembangan ekonomi sangat bergantung pada aspek hukum, maka hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai.⁷ Pancasila sebagai dasar negara di mana sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti nilai-nilai ketuhanan harus menjadi ruh kehidupan bernegara. Untuk itulah upaya keras harus dilakukan, baik secara akademis maupun praktis dengan menginternalisasikan ataupun mengaktualisasikan nilai-nilai agama (kesyariahan) ke dalam sistem ekonomi dalam rangka mewujudkan ekonomi yang berbasis nilai-nilai agama (syariah) yang sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Dengan kata lain terbentuknya budaya masyarakat ekonomi syariah sebagai suatu *kulturbegrif*, pengertian budaya⁸

C. Konsep Nilai.

Manusia dilahirkan di dunia ini sesungguhnya mengemban amanat sebagai khalifah Allah yang bertugas memakmurkan bumi. Manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah Adam AS. Dari nabi Adam secara turun temurun atau generasi ke generasi, hingga sekarang ini, dalam berbagai komunitas, manusia selalu

⁷ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung, CV. Mandar Maju.), hal. 6.

⁸ M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Surabaya: Ubhara Press, 1998), hal. 38.

berupaya menjalani hidup dalam kaitannya sebagai khalifah Allah. Secara alamiyah atau naluriah kehidupan mereka seakan terbimbing ke arah yang dipersepsikan memiliki nilai kegunaan dalam mengemban tugasnya. Oleh karena itu istilah "baik" dan "buruk" merupakan hal yang sangat akrab bagi mereka. Entah mengapa, segala sesuatu yang memiliki potensi untuk bisa memakmurkan bumi ini, mereka katakan sebagai sesuatu yang baik dan bernilai.

Berangkat dari pemahaman yang demikian, istilah nilai merupakan sesuatu yang sangat abstrak dan universal. Karena keabstrakan dan universalnya itulah maka pengertian nilai bisa dimaknai dan ditafsirkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Akan tetapi dari berbagai perbedaan sudut pandang tentang arti nilai tersebut, dalam kerangka filsafat pembahasan tentang nilai masuk dalam ruang lingkup aksiologi, karena dipandang dari sudut kegunaannya.⁹ Tentu saja berbagai sudut pandang tersebut berpijak pada masing-masing bidang ilmu yang melatarbelakanginya.

Para pakar psikologi misalnya, memiliki pandangan yang berbeda dengan pakar di bidang lainnya dalam hal mengartikan apa sesungguhnya hakikat nilai tersebut. Gordon Allport sebagai seorang psikolog kaliber menafsirkan nilai sebagai sebuah keyakinan yang terjadi pada wilayah psikologis yang menempati posisi tertinggi di antara wilayah-wilayah lain seperti hasrat motif, sikap, keinginan dan

⁹ Lihat I Dewa Gede Atmaja, 2013, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press), hal. 11, yang menyatakan aksiologi hukum (ajaran nilai, *waardenleer*), penentu isi nilai-nilai dalam hukum, seperti persamaan, kebebasan.

kebutuhan.¹⁰ Kupreman sebagaimana dikutip oleh Muhammad memaparkan nilai sebagai berikut:

Nilai merupakan sebuah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara cara-cara tindakan alternatif. Nilai-nilai dan keyakinan yang berkembang dalam suatu organisasi merupakan dasar dari adanya budaya organisasi. Nilai ini berperan penting dalam mempengaruhi perilaku etis individu dalam organisasi.¹¹

Teori nilai ini dalam pendekatan psikologis merupakan bagian dari filsafat moral yang membincang persoalan baik dan buruk. Sehingga istilah baik dan buruk sejatinya adalah hasil keputusan moral. Oleh karenanya, penilaian tentang baik dan buruk tersebut hanya sampai pada batas opini pribadi sebagai fakta moral yang tidak memiliki ukuran pasti secara universal sebagaimana fakta sosial ataupun ilmu alam yang memiliki ukuran pasti (keakuratan) dalam persepsi banyak orang. Demikian halnya dengan ekonomi, nilai dari seorang ekonom berarti harga suatu produk dan pelayanan yang dapat diandalkan untuk kesejahteraan manusia.¹² Dengan demikian antara ilmu sosial (termasuk ekonomi), ilmu alam, dan psikologi atau etika terdapat perbedaan yang sangat tajam dan mudah untuk dipilah. Perbedaan tersebut terletak pada sifat masing-masing pendekatan ilmu yang melingkupinya. Jika ilmu alam dalam menuntukan segala sesuatu bersifat obyektif, maka psikologi dalam

¹⁰ Gordon Alport dalam Muhammad, 2006, *Dialektika Pemahaman Nilai-Nilai Syariah dengan Perilaku Ekonomi Komunitas Bank Syariah di Malang* (Disertasi: Universitas Negeri Malang, Disertasi), hal.24.

¹¹ Muhammad, hal. 25

¹² Mulyana, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta), hal.8.

menentukan nilai segala sesuatu bersifat subyektif. Yang demikian itu karena obyek dari ilmu alam bisa ditangkap secara indrawi sebagai fakta empiris, sedangkan obyek dari psikologi hanyalah merupakan fakta moral yang tidak memiliki ukuran universal disepakati oleh banyak orang melainkan merupakan opini pribadi setiap orang yang memberikan penilaian. Persoalannya adalah nilai dalam ilmu ekonomi didekati dari perspektif ilmu alam atau psikologi, tentu harus dilihat secara faktual terlebih dahulu, sehingga dapat dipilih pendekatan yang tepat, apakah memakai pendekatan ilmu alam ataupun psikologi. Pendekatan terhadap filsafat moral yang sering kali disebut teori nilai ini menurut Gordon Graham memiliki tiga arti penting¹³, yaitu:

Pertama, pendekatan tersebut memberikan alternatif bagi subyektivitas etis dan realisme moral sebagaimana pernyataan Alasdair MacIntyre sebagai berikut:

Adapun makna perkataan mengenai beberapa anggota tertentu dari spesies tertentu bahwa spesies tersebut tumbuh, bahwa spesies tersebut baik, atau bahwa ini atau itu bagus bagi spesies tersebut, bahwa hal itu mendorong pertumbuhannya-penegasan yang dapat kita buat mengenai tumbuhan kaktus berduri atau kubis, keledai dan lumba-lumba, yang memiliki makna sama dengan "tumbuh" dan makna sama dengan "baik"- dalam membuat penegasan semacam itu sulit untuk menggambarkan beberapa properti tidak alamiah atau mengekspresikan sebuah sikap, sebuah emosi, atau sebuah dukungan¹⁴.

Penjelasan tentang nilai, dalam tingkatan ini memiliki konten deskriptif yang riil dalam pengertian ketika seseorang menyatakan sesuatu itu baik ataupun buruk

¹³. Gordon Graham, *Eigh Theories of Ethics*, terjemahan, Irfan M Zakkie, 2015, *Teori-Teori Etika*, (Bndung: Nusamedia), hal. 88.

¹⁴ Alasdair MacIntyre Gordon Graham, *Eigh Theories of Ethics*, terjemahan, Irfan M Zakkie, hal. 88

tanpa memberikan penjelasan apapun, dan ini berlaku sama, baik terhadap manusia maupun makhluk lainnya sebagaimana pernyataan di atas.

Kedua, deskripsi semacam itu ditentukan bukan oleh kesukaan atau ketidaksukaan kita, namun oleh fakta mengenai apa yang benar-benar mereka kerjakan.¹⁵ Oleh karena itu merupakan sebuah kekeliruan apabila kita melihat dua orang yang melakukan akad jual-beli di mana penjual menyembunyikan cacat yang ada pada barang yang diperjualbelikan, kemudian kita mengatakan bahwa penjual tersebut adalah orang yang baik atau sholeh. Kekeliruannya terletak pada pendeskripsian predikat baik atau shaleh yang sesungguhnya bertentangan dengan fakta yang ada.

Ketiga, konten deskriptif kata-kata nilai memiliki sebuah elemen "normatif" di dalamnya.¹⁶ Semisal kita menyatakan bahwa meniatkan akad transaksi dalam perekonomian sebagai bentuk peribadatan kepada Allah SWT itu baik dan termasuk amal shaleh, berarti merekomendasikan orang lain untuk berbuat atau melakukannya. Begitu juga sebaliknya, apabila kita menyatakan bahwa mengurangi timbangan dalam takaran jual-beli itu buruk dan dilarang oleh agama, berarti kita merekomendasikan untuk meninggalkan hal tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, norma adalah sarana yang dipakai oleh masyarakatnya untuk menertibkan, menuntut, dan mengarahkan

¹⁵ Gordon Graham, *Eigh Theories of Ethics*, terjemahan, Irfan M Zakkie, 2015, *Teori-Teori Etika*, (Bndung: Nusamedia), hal. 89.

¹⁶ Gordon Graham, *Eigh Theories of Ethics*, terjemahan, Irfan M Zakkie, 2015, *Teori-Teori Etika*, (Bndung: Nusamedia), hal. 89

tingkah laku anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lain¹⁷. Berkaitan dengan penertiban, penuntutan, dan pengarahan terhadap tingkah laku masyarakat, maka sesungguhnya yang diharapkan adalah terwujudnya justifikasi apakah perilaku tersebut sesuai atau tidak sesuai, benar atau salah, ataupun baik atau buruk dalam sudut pandang norma yang telah dijadikan sebagai acuan norma kehidupan. Istilah sesuai atau tidak sesuai, benar atau salah, maupun baik atau buruk, berarti merupakan sebuah penilaian yang dengannya akan melahirkan sebuah pengertian bahwa masyarakat mentaati norma (hukum) yang berarti norma hukum tersebut efektif sebagai pedoman perilaku, atau masyarakat tidak mentaati norma hukum yang berarti norma hukum tersebut tidak efektif sebagai pedoman perilaku. Dengan demikian sebuah penilaian sangat tergantung kepada ditaati atau tidaknya sebuah norma hukum sebagai pedoman perilaku kehidupan. Lebih jauh dari pengertian tersebut, akan dikemakan arah sebuah norma, sangat bergantung kepada masyarakat di mana masyarakat tersebut berkedudukan sebagai subyek hukumnya. Masyarakat sebagai subyek hukum keberadaannya sangat menentukan arah dan tujuan ke mana dan bagaimana sebuah norma diwujudkan agar bisa memberikan arahan kepada masyarakat tersebut demi lahirnya sebuah ketertiban yang dicita-citakan. Karena cita hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Hal ini sesuai dengan madzhab sejarah yang menyatakan bahwa hukum itu adalah jiwa bangsa (volgest). Dalam perspektif Satjipto Rahardjo¹⁸, norma itu adalah sebagai cerminan

¹⁷ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hal.27

¹⁸ Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, hal. 30.

kehendak masyarakat. Kehendak masyarakat untuk mengarahkan tingkah laku anggota-anggota masyarakat itu dilakukan dengan membuat pilihan antara tingkah laku yang disetujui dan yang tidak itulah yang kemudian merupakan norma dalam masyarakat itu. Berangkat dari pemikiran yang demikian ini, berarti norma hukum merupakan persyaratan dari penilaian-penilaian setelah terjadinya implementasi norma hukum yang bersangkutan. Norma hukum yang harus diwujudkan oleh masyarakat di mana mereka berada, karena norma hukum itu memang merupakan ide yang dituangkan dalam sebuah norma tertulis dalam rangka mewujudkan terbentuknya sebuah bangunan masyarakat yang diidolakan.

Norma hukum dan penilaian terhadap masyarakat merupakan dua hal yang secara simbiosis membutuhkan dan saling mempengaruhi. Dalam satu sisi norma hukum dijadikan patokan untuk menilai sebuah perilaku, dan di sisi yang lain penilaian terhadap perilaku sebagai stimulan dikembangkan atau dilahirkannya norma-norma baru yang harus dimunculkan seiring dengan perkembangan zaman. Untuk itulah Zevenbergen¹⁹ sebagaimana dikutip oleh Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa norma hukum itu dalam dirinya mengandung dua hal, yaitu: Patokan penilaian dan Patokan tingkah laku. Patokan penilaian berfungsi sebagai instrumen untuk menilai kehidupan masyarakat, yaitu dengan menyatakan apa yang dianggap baik atau tidak baik. Dari penilaian ini selanjutnya baru bisa dilahirkan petunjuk tentang tingkah laku atau perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dilakukan atau ditinggalkan.

¹⁹ Zevenbergen dalam Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*. Hal. 30

Secara alamiah bersamaan lahirnya manusia di alam semesta ini, maupun adanya itu memang diadakan dalam rangka memberikan pedoman hidup bagi manusia, yang jelas aturan tersebut berguna sebagai pedoman hidup agar orang tidak berperilaku menyimpang. Orang yang tidak berperilaku menyimpang dalam konteks yang demikian dikatakan orang yang benar. Sebaliknya orang yang berperilaku menyimpang dari aturan yang telah disepakati, dikatakan orang yang tidak taat pada aturan. Dengan kata lain orang tersebut dikatakan sebagai orang yang salah. Orang yang perilakunya benar dan sesuai dengan aturan yang ada dinilai sebagai orang yang baik, sementara orang yang perilakunya salah disebut sebagai orang yang buruk atau tidak baik. Dengan demikian nilai adalah merupakan keputusan hukum atas perilaku manusia dalam kaitannya dengan sebuah aturan atau norma. Nilai itu sendiri dalam maknanya yang universal tentu memiliki pengertian yang sangat luas sesuai dengan sudut pandang dari mana orang menilai sesuatu tersebut. Yang jelas nilai merupakan hasil upaya manusia dalam memberikan justifikasi terhadap sesuatu apakah sesuatu tersebut memiliki nilai guna atau manfaat atau tidak, hingga sampai pada keputusan baik dan buruk. Hasil keputusan yang baik berarti memiliki nilai manfaat dan hasil yang buruk tidak memiliki nilai manfaat. Itulah sebabnya dalam kajian filsafat, kajian tentang nilai masuk dalam ranah aksiologi.

D. Konsep Nilai dalam Perspektif Syariah.

Konsep nilai dalam perspektif syariah sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan konsep nilai yang disampaikan oleh para pakar sebagaimana dipaparkan di atas. Hanya saja perbedaan itu muncul karena berbedanya pendekatan yang dipakai. Terlebih ketika syariah dikatakan sebagai produk *ilahiyyah* yang sesungguhnya tidak banyak memberikan peluang pemikiran manusia kecuali dalam hal-hal tertentu yang berkaitan dengan masalah fikih (hasil pemikiran manusia yang didasarkan pada ayat al-Qur'an yang *dhonn'iy al-dilalah*). Sebagaimana dimaklumi, bahwa Islam adalah agama yang *kaaffah* atau universal, menjangkau seluruh aspek kehidupan. Dengan sifat universalnya itu Islam tidak hanya berupa ajaran yang membincang masalah ritual belaka, melainkan menyentuh seluruh aspek kehidupan, termasuk di dalamnya adalah perekonomian. Keuniversalan Islam yang menyentuh seluruh aspek kehidupan tersebut sudah barang tentu mengandung nilai-nilai ataupun asas-asas yang dengannya seluruh aspek kehidupan terkaver, serta antara satu dengan yang lainnya tidak bisa terlepas. Pelaksanaannya dianggap sebagai bentuk pengabdian kepada Sang Pencipta. Nilai-nilai inilah sesungguhnya yang membedakan antara ekonomi Islam dengan ekonomi pada umumnya. Ekonomi pada umumnya, semisal ekonomi kapitalis-materialis ataupun yang lainnya, meletakkan tujuannya demi untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, hingga tidak melihat sisi-sisi lain tentang kemanusiaan. Dalam upaya penguasaan pasar, konsep perekonomian kapitalis tidak memandang eksploitasi dan monopoli sebagai bentuk penindasan, bahkan implementasinya dibungkus dengan usaha cerdas dan mobilitas tinggi yang seakan

turut ambil bagian secara besar-besaran dalam memajukan dunia dalam perspektif perekonomian. Padahal di sisi lain akibat eksploitasi dan monopoli tersebut ada pihak-pihak yang justru dikorbankan.

Nilai-nilai yang berfungsi sebagai pengikat dan sekaligus mobilitas dalam perekonomian Islam, secara teoritik terkemas menjadi dua bagian. *Pertama*, berupa nilai-nilai utama (primer) yang bersifat integral universal di mana satu dengan lainnya membentuk sebuah kolaborasi sistem kerja yang berupa suatu kesatuan atau unity. Dengan pengertian ini nilai-nilai utama tersebut selain tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya, juga tidak bisa hanya diberlakukan sebagiannya saja. *Kedua*, berupa sekunder (cabang dari nilai-nilai utama) yang secara parsial bekerja dan mempengaruhi substansi perekonomian hingga pada gilirannya membentuk suatu kultur atau budaya hukum ekonomi Islam. Nilai-nilai cabang (sekunder) tersebut secara akademik sering diistilahkan oleh para pakar ekonomi Islam dengan istilah asas hukum Islam. Nilai cabang atau asas hukum ini bila disandingkan dengan nilai utama, maka ia memiliki kedudukan strategis sebagai nilai sekunder yang fungsinya mendukung dan memberikan penguatan nilai utama (primer). Karena dinamakan asas, maka nilai-nilai cabang atau nilai sekunder tersebut memiliki posisi dan arti yang sangat penting sekali. Bahkan tanpa dengannya, sebuah perilaku (ekonomi), sekalipun keberadaannya bisa terdeteksi (berwujud), akan tetapi wujudnya tersebut bisa dikatakan keropos dan bisa dipastikan akan mengalami kerusakan pada dirinya sendiri dalam rentangan waktu yang tidak begitu lama. Yang demikian itu karena asas

merupakan pondasi atau *ushul* yang harus ada sebagai dasar sebuah bangunan, termasuk bangunan ekonomi. Wahbah al-Zuhaili menyatakan:

الأصل ما يبنى عليه غيره أكان هذا البناء حسيا أو معنويا²⁰ (asal atau dasar adalah sesuatu di mana sesuatu yang lain dibangun di atasnya, baik sesuatu tersebut berbentuk material maupun non material). Berbicara masalah dasar, tentu keberadaannya tidak terlihat oleh indra mata, akan tetapi sekalipun demikian tanpa adanya dasar tersebut bisa dipastikan bahwa sebuah bangunan akan mudah roboh bila terkena gangguan atau bencana, baik angin kencang, gempa bumi ataupun lainnya. Hal ini sejalan dengan pemikiran Sulaiman Asyqar tatkala membincang persoalan iman. Ia mengatakan bahwa iman itu bagaikan pohon yang subur dan rindang, memiliki banyak tangkai dan buah-buahan. Kesuburan pohon tersebut tidak lain karena terdapat unsur yang paling esensial yang tidak terlihat oleh mata, akan tetapi dapat diyakini bahwa dengan ketiadaannya, pohon tersebut cepat atau lambat pasti akan mati. Unsur esensial tersebut diistilahkan dengan kata *juzur* yang berada di bagian bawah pohon sebagai akarnya²¹. Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan konkrit tentang kedua nilai utama (primer) dan sekunder tersebut dipaparkan sebagai berikut:

a. Nilai Utama (primer):

Nilai-nilai utama (primer dan esensial universal) ekonomi Islam lahir atau muncul sebagai pengejawantah tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Secara

²⁰ Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr), hal. 16.

²¹ Disarikan dari Sulaiman al-Asyqar, 1984, *Al-Aqidah Fi Allah*, (Kuwait: Maktabah al-Falah), hal. 17.

normatif diciptakannya manusia tidak lain hanyalah agar mengabdikan kepada Allah SWT. Artinya tidak ada kegiatan apapun kecuali diformulasikan sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT. Dengan demikian apabila manusia melakukan aktifitas di muka bumi ini dan tidak berpotensi sebagai pengabdian kepada Allah SWT, maka aktifitas tersebut dinyatakan sebagai kesalahan, setidaknya aktifitas tersebut hanya diakui sebatas adat dan bukan ibadah. Agar aktifitas manusia terformulasi sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT, maka perlu adanya aturan penilaian yang dengannya seluruh aktifitas bisa terukur dan tidak menyimpang dari bingkai yang telah ditentukan. Hasil penilaian tersebut untuk selanjutnya bisa dinamakan sebagai pertanggungjawaban manusia atas aktifitas yang ia lakukan. Penilaian atau pertanggungjawaban tersebut adalah:

1. Nilai *Robbaniyyah* atau *Ilahiyyah*.
2. Nilai *Syar'iyah* atau aturan perundang-undangan atau fikih.
3. Nilai *Akhlaqiyyah* atau *ihسان* atau *tasawuf*.

Ketiga nilai tersebut satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan dan juga tidak dapat dipergunakan hanya sebagian saja. Ketiga hal tersebut sekalipun memiliki makna yang berbeda tetapi harus diimplementasikan secara integral bersamaan sebagai suatu kesatuan sistem di mana satu sama lainnya saling memperkuat dan membentuk sebuah kekuatan yang utuh. Nilai *Robbaniyyah* atau *Ilahiyyah* yang juga bisa disebut nilai keimanan atau akidah ini merupakan nilai yang paling utama dari seluruh aktifitas manusia dalam kapasitasnya sebagai hamba Allah termasuk di dalamnya aktifitas perekonomian. Untuk mempermudah pemahaman tentang

mekanisme dan sistem kerja ketiga penilaian asasi tersebut dibagangkan sebagai berikut:



Penilaian Asasi dengan penekanan di atas menunjukkan bahwa penilaian Asasi

adalah penilaian yang dilakukan oleh Asasi yang berwenang untuk menilai

kegiatan yang dilakukan oleh Asasi yang berwenang untuk menilai

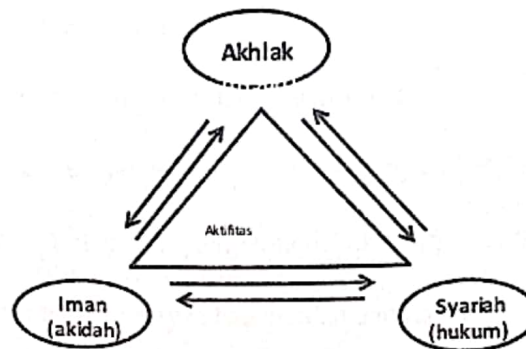
kegiatan yang dilakukan oleh Asasi yang berwenang untuk menilai

kegiatan yang dilakukan oleh Asasi yang berwenang untuk menilai

kegiatan yang dilakukan oleh Asasi yang berwenang untuk menilai

kegiatan yang dilakukan oleh Asasi yang berwenang untuk menilai

Bagan: 1



Pertama, berkaitan dengan pengertian nilai *rabbaniyyah* atau *ilahiyyah* yang secara fundamental dinamakan keimanan atau akidah, dalam perekonomian, menurut pendapat Yusuf Qardhawi²² bertitik tolak dari empat hal, yaitu:

1. Ekonomi Islam adalah ekonomi *ilahiyyah*, karena titik berangkatnya dari Allah, tujuannya mencari ridla Allah dan cara-caranya tidak bertentangan dengan syariatNya. Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَتَابِعِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ

النُّشُورُ

²² Disarikan dari Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafifuddin dkk., 1987, (Jakarta: Rabbani Press), hal. 25-38.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali) setelah dibangkitkan".

2. Ekonomi dalam pandangan Islam bukanlah tujuan itu sendiri, tetapi merupakan kebutuhan bagi manusia dan sarana yang lazim baginya agar bisa hidup dan bekerja untuk mencapai tujuannya yang tinggi. Ekonomi merupakan sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi akidah dan risalahNya.
3. Sebagai pengawasan internal atau hati nurani, yang ditumbuhkan oleh iman di dalam hati seorang muslim, dan menjadikan pengawas bagi dirinya. Hati nurani seorang muslim tidak akan mengijinkan untuk megambil yang bukan haknya, memakan harta orang lain dengan cara yang batil, juga tidak memanfaatkan keluguan dan kelemahan orang yang lemah, kebutuhan orang yang mendesak, atau memanfaatkan krisis makanan, obat-obatan, dan pakaian dalam masyarakat. Seorang muslim juga tidak akan memanfaatkan kesempatan untuk meraup keuntungan yang besar dari penderitaan orang lain. Dasar pemikiran ini adalah firman Allah SWT.:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

"Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui".

4. Pentingnya pendidikan iman untuk mengarahkan perekonomian ke arah yang dikehendaki Allah dan mengendalikannya dengan hukum Allah juga. Hal ini penting dalam rangka menyelaraskan dorongan individu dengan kemaslahatan bersama, sebelum segala aturan perundang-undangan buatan manusia (dalam berbagai konteks, baik negara maupun yang lainnya) ada, maka imanlah yang menjadi kontrol utama dan pijakannya. Sehingga dengan demikian pandangan manusia terhadap ekonomi tidak seperti pandangan kapitalisme yang ingin memiliki dan menguasai segalanya, melainkan segalanya itu hakikatnya adalah milik Allah SWT. semata. Dengan demikian, monopoli, eksploitasi atau apapun namanya yang bertentangan dengan tujuan pengabdian kepada Allah SWT. Adalah salah dan batil.

Kedua, berkaitan dengan nilai syariah, yang menjadi unsur terpenting adalah substansi hukumnya yang juga disebut sebagai undang-undang dan aturan perundang-undangan. Undang-undang dan aturan perundang-undangan inilah yang dalam konteks hukum positif yang sejatinya dinamakan hukum. Hukum dalam pengertian ini adalah sebagai aturan tertulis yang secara otoritatif dapat memberikan petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia. Aturan-aturan yang dikehendaki sebagai petunjuk

dan pedoman tersebut secara formal dinamakan aturan perundang-undangan. Aturan perundang-undangan, dalam konteks kajian ilmu hukum disebut sebagai substansi hukum. Selanjutnya substansi hukum juga dikenal dengan sebutan aturan hukum normatif atau perundang-undangan (*statutory, enacted law*)²³.

Hukum dalam pengertian yang demikian, dalam konteks hukum Islam disebut syariat, yang selanjutnya dikembangkan menjadi dua macam yaitu syariat itu sendiri dan fikih Islam. Fikih Islam sebagai hasil ijtihad para ulama' atau pakar hukum Islam di bidang perekonomian yang bersandar pada ayat-ayat al-Qur'an yang *dlanniy al-dilalah* atau sabda Nabi Muhammad SAW. (al-Hadits sebagai sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an). Al-Qur'an dan al-Hadits yang *dlanniy al-dilalah* ini merupakan sumber hukum yang dikembangkan melalui metode *ushul* fikih dan dikenal sebagai hukum produk pemikiran ulama' (*fikih/Islamic jurisprudent*). Itulah sebabnya secara global hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua bagian. *Pertama*, hukum Islam sebagai produk murni *ilahiyah* yang disebut dengan syari'ah. Hukum dalam pengertian ini tidak dapat diamandemen. Hukum Islam merupakan hukum yang terkodifikasi²⁴. Di manapun dan kapanpun ia harus dilaksanakan sesuai dengan aturan normatifnya. Oleh karena itu ia bersifat absolut. Akal pikiran sedikitpun tidak memiliki peluang untuk campur tangan. *Kedua*, hukum Islam sebagai produk

²³ Dielaborasi dari Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung CV. Utomo, 2009), hal. 170 dalam bentuk tabel yang menjelaskan perbedaan *civil law* dan *common law*, tepatnya perihal sumber hukum positif (substansi) hukum. Perbedaan klasikal dan ekstrim pada keluarga hukum *civil law* menitikberatkan kepada wujud perundang-undangan (*statutory, enacted law*), sedangkan *common law* menitikberatkan pada putusan hakim (*judge made law*).

²⁴ Ade Maman Suherman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada), hal. 260.

mujtahid (pakar hukum Islam). Di sinilah hukum Islam dapat berubah sesuai dengan variabel pengubahnya. Hukum Islam dalam pengertian ini dipengaruhi oleh waktu dan tempat di mana ia dilaksanakan, sebagaimana kaidah fikih menyatakan: *تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأماكن* (hukum itu dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat).

Ketiga, nilai akhlak. Ekonomi Islam tampil dengan kekuatan yuridisnya karena memang bersumber dari al-Qur'an dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut bukan ciptaan atau hasil pemikiran manusia, melainkan berupa wahyu yang sedikitpun tidak tercampuri dengan hasil pemikiran manusia kecuali yang bersifat *fiqhiy*. Bahkan akhlak ini mampu memberikan makna baru terhadap konsep nilai, dan mampu mengisi kekosongan pikiran yang nyaris muncul akibat alat industrialisasi²⁵. Nilai akhlak merupakan titik kulminasi atau puncak segala aktifitas manusia, apakah sebuah perilaku itu dianggap bernilai atau tidak. Karena hukum sebagai aturan tertulis yang secara otoritatif dapat memberikan petunjuk dan pedoman bagi kehidupan manusia, maka di balik seluruh perintah yang tertuang dalam substansi hukum atau aturan perundang-undangan haruslah memiliki tujuan akhir yang berupa lahirnya nilai-nilai positif pada diri setiap subyek hukum yang melaksanakan norma atau substansi hukum dimaksud. Selanjutnya nilai-nilai positif atau hasil penilaian terhadap perilaku tersebut merupakan petunjuk balik apakah sebuah norma hukum cukup handal untuk dijadikan sebagai ukuran perilaku atau pedoman. Ada dua

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Hal. 61.

kemungkinan dalam menjawab persoalan ini, yaitu substansi hukum mungkin belum handal untuk dijadikan aturan tertulis atau pedoman bagi kehidupan, atau memang manusianya (subyek hukumnya) yang enggan mentaati aturan tertulis tersebut. Terlepas dari dua pengertian tersebut yang jelas nilai akhlak atau moral sebagai bagian dari sistem hukum sebagai nilai utama atau esensial, haruslah bisa berfungsi merubah karakter masyarakat hingga menjadi lebih baik ataupun sempurna. Islam sendiri sebagai agama samawi meletakkan akhlak dalam posisi yang paling tinggi. ini tercermin dalam sabda Rasulullah yang menyatakan: *انما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق* ("Aku ini diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak karimah")

Ekonomi Islam berdasarkan ulasan di atas memiliki corak tersendiri berbeda dengan sistem ekonomi lainnya. Bila sistem ekonomi kapitalis dalam rangka menguasai pasar berupaya melepaskan diri dari sistem moralitas, maka sistem ekonomi Islam justru sebaliknya. Islam meletakkan perekonomian harus senyawa dengan akhlak dan akidah serta syariah. Akhlak, akidah, dan syariah merupakan bagian integral dari sistem ekonomi yang dibangun oleh Islam. Jack Aster²⁶ dalam bukunya "Islam dan Perkembangan Ekonomi" berkata: Islam adalah sebuah sistem hidup yang aplikatif dan secara bersamaan mengandung nilai-nilai akhlak yang tinggi. Kedua hal ini berkaitan erat, tidak pernah terpisah satu dengan lainnya. Perpaduan antara ekonomi dan akhlak ini juga ditegaskan oleh G. Birth bahwasanya perpaduan tersebut tidak terjadi secara kebetulan di dalam Islam yang tidak mengenal

²⁶ Jack Aster dalam Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Hal. 61.

pemisahan antara hal-hal material dan hal-hal spiritual²⁷. Keuniversalan syariat Islam yang memang merupakan paduan antara akidah, syari'at, dan akhlak melarang keras setiap pertumbuhan dan perkembangan ekonomi memisahkan diri dari integrasi ketiganya.

Dari sini hukum sebagai norma positif dalam perspektif Islam, harus seiring dan sejajar untuk mengantarkan sistem perekonomian Islam sebagai instrumen meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Hal ini sangat berbeda dengan hukum positif atau positivisme hukum dengan *civil law*-nya yang justru memisahkan hukum dari unsur moral. Pada era modern ini hukum dicirikan berupa kesepakatan legislator yang melahirkan "*statutory law*" atau "*state law*" (hukum negara) yang berciri "rasional" dan "normatif"²⁸. Hukum modern ini memiliki beberapa ciri, satu di antaranya adalah berwatak sekuler. Artinya materi muatan aturan hukum modern terpisah dari agama dan etika, yang berarti keabsahan hukum modern tidak berdasarkan moralitas atau kebenaran moral²⁹. Pemikiran ini dipengaruhi oleh pandangan Hans Kelsen yang menyatakan bahwa ajaran hukum murni secara metodologis menolak masuknya nilai-nilai moral³⁰. Memang sangat aneh suatu institusi yang mencampuradukkan hukum, tata krama, dan adat istiadat, hal-hal yang pada hakekatnya berbeda dan terpisah: namun meski demikian, juga terdapat

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, Hal. 62.

²⁸ I Dewa Gede Atmaja, 2013, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press), hal.27.

²⁹ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, ed, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal 369.

³⁰ I Dewa Gede Atmaja, 2013, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, hal. 33.

hubungan erat di antara hal-hal itu³¹. Pendapat ini secara tidak langsung memberikan dukungan terhadap hukum ekonomi Islam yang nyata-nyata meletakkan moral sebagai instrumen di dalamnya. Plato, sebagai seorang filosof ternama mengatakan bahwa Rhadamantus, yang memerintah sebuah negeri di mana para warganya sangat religius, bisa menyelesaikan dengan baik setiap kasus yang terjadi hanya dengan mewajibkan kepada si tertuduh untuk mengucapkan sumpah.³² Ini artinya hukum itu sesungguhnya sangat memerlukan kehadiran moral atau sifat religius di dalamnya. Untuk itulah Plato juga mengatakan jika para warga tidak religius, maka sumpahpun tidak akan ada gunanya, kecuali pada mereka yang bersikap sama sekali tidak memihak, semisal yang terdapat pada hakim dan saksi.³³ Berdasarkan pandangan Plato tersebut, Indonesia dengan falsafah Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, sangat berpeluang besar untuk mewujudkan sistem perekonomian yang mengangkat dan mengedepankan nilai-nilai akhlak sebagai salah satu instrumennya.

b. Nilai Cabang (Sekunder)

Nilai utama dalam perspektif ekonomi Islam sebagaimana dipahami dari uraian di atas, merupakan hal pokok yang secara integral tidak bisa dipisahkan antara satu dengan lainnya, bahkan implementasinya harus selalu bersamaan, satu dengan lainnya saling memberi kekuatan. Berbeda dengan nilai utama adalah nilai sekunder

³¹ Motesquieu, *The Spirit of Law*, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terjemhan M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media), hal. 282.

³² Motesquieu, *The Spirit of Law*, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terjemhan M. Khoiril Anam, hal. 283.

³³ Motesquieu, *The Spirit of Law*, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terjemhan M. Khoiril Anam, hal. 283.

yang berpotensi memberikan dukungan kekuatan terhadap implementasi

Secara parsial nilai sekunder ini dapat bekerja sendiri dalam kapasitasnya sebagai asas hukum yang berbeda antara asas yang satu dengan asas lainnya. Menurut Fathurrahman Djamil³⁴, setidaknya harus ada lima macam asas yang harus ada dalam pelaksanaan kontrak (aktivitas ekonomi pen.), yaitu: asas Kebebasan (*al-Hurriyyah*), asas Persamaan dan Kesetaraan (*al-Musawah*), asas Keadilan (*al-'Adalah*), asas Kerelaan (*al-Ridla*), dan asas Tertulis (*al-Kitabah*).

1. Asas Kebebasan (*al-Hurriyyah*)

Asas ini memberikan pengertian bahwa para pihak bebas membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kebiasaan, serta didasari dengan iktikad baik. Berdasarkan pernyataan ini, berarti asas ini mengandung makna bahwa kedua belah pihak bebas untuk menentukan isi perjanjian, asalkan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis perjanjian ini juga disebut perjanjian *innominatif* yang pada umumnya timbul dalam kegiatan bisnis,³⁵ dan dikarenakan keberadaannya tidak diatur terlebih dahulu pada KUHPerdata. Asas kebebasan berkontrak ini memiliki arti yang sangat penting bagi setiap orang yang melakukan kerja sama di bidang ekonomi. Karena dengan kebebasan berkontrak inilah pada akhirnya para pihak dapat menentukan sendiri isi

³⁴ Disarikan dari Fathurrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti), hal. 249-251.

³⁵ Zaeni *Op. Cit.* Hal. 29

perjanjian termasuk pilihan hukumnya (*the parties freedom of choose the applicable law*). Para pihak benar-benar bebas mengatur dan menentukan apa yang dikehendaki dalam kontraknya, termasuk memilih hukum negara mana yang akan dipakai dalam berontrak (*choice law*). Menurut hukum Islam, azas kebebasan berkontrak ini juga merupakan prinsip dasar dalam setiap perjanjian. Para pihak yang melakukan transaksi bisnis mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian (*freedom of making contrac*), baik dari segi yang diperjanjikan (obyek perjanjian) maupun menentukan persyaratan-persyaratan lain, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian bila terjadi sengketa³⁶. Namun kebebasan ini tidaklah *absolut*. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'at Islam, maka perjanjian yang telah disepakati tersebut boleh dilaksanakan. Syari'at Islam memberikan kebebasan kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan akibat hukumnya adalah ajaran agama³⁷, sebagaimana yang ditunjukkan oleh QS. Al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةٌ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ تَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

³⁶ Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam, di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing, hal. 238-239.

³⁷ Fathurrahman Djamil, "Hukum Perjanjian Syari'ah", dalam *Kompilasi Hukum Perikatan* oleh Mariam Darus Badruzaman et al, cet. I, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hal 249.

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu, (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. Begitu juga QS. Al-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۚ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا

﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (al-sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. Begitu pula QS. Al Baqarah ayat 256:

لَاۤ اِكْرَاهَ فِى الدِّيْنِۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى لَاۤ اَنْفِصَامَ لَهَاۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿٢٥٦﴾

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat, karena itu barang siapa ingkar kepada *Thaghut*

dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Berkaitan dengan masalah muamalah, Islam memberikan kebebasan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya, sebagaimana dinyatakan dalam kaedah fikih yang berbunyi:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya"³⁸

Berdasarkan asas kebebasan ini, maka pemaksaan atau intervensi terhadap suatu perjanjian dianggap pelanggaran terhadap prinsip dasar perjanjian itu sendiri, oleh karenanya perjanjian yang dilakukan dapat dinyatakan sebagai perjanjian yang cacat hukum, bahkan dapat dinyatakan tidak sah demi hukum.

2. Asas Persamaan dan Kesenjangan (*al-Musawah*)

Asas persamaan merupakan asas hukum kontrak yang memiliki kesetaraan dengan asas-asas lainnya. Asas ini memberikan landasan bahwa para pihak yang melakukan kontrak atau transaksi memiliki kedudukan yang sama. Para pihak memiliki derajat kewajiban dan hak yang sama di muka hukum. Oleh karena itu dalam

³⁸ Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, edisi kedua, diterbitkan atas kerjasama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia, hal. 5.

pemenuhan prestasi maupun penerimaan hak, keduanya diposisikan secara proporsional sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam suatu akad bisnis atau perjanjian. Asas persamaan ini juga memiliki pengertian yang mirip bahkan berdekatan. Oleh karena itu secara implementatif asas persamaan ini diberlakukan secara seiring dengan asas keseimbangan serta asas keselarasan guna tercapainya tujuan hukum dalam hal terciptanya keteraturan dan ketertiban dalam perilaku bisnis. Menurut Sri Rejeki Hartono³⁹, keseimbangan ini dapat diproyeksikan ke bawah, yang antara lain sebagai berikut:

1. Keseimbangan antara kepentingan umum dengan kepentingan privat.
2. Keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen
3. Keseimbangan antara kepentingan pengusaha dengan kepentingan tenaga kerja.
4. Keseimbangan antara kepentingan para pihak di dalam perjanjian.

Kesamaan asas keseimbangan dengan asas persamaan ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan perjanjian mempunyai kedudukan yang sama antara satu dengan lainnya sehingga pada saat menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan atau kesetaraan tersebut⁴⁰. Asas persamaan ini berpotensi menepis perbedaan atau tingkat sosial yang secara nyata

³⁹ Sri Rejeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung CV. ManDâr Maju, 2000), hal. 13

⁴⁰ Warkum Sumitro, *OP. Cit.* hal. 239.

"Katakanlah: "Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan". dan (katakanlah): "luruskanlah muka (diri) mu di setiap sembahyang dan sembahlah Allah dengan mengikhlaskan ketaatanmu kepada-Nya. sebagaimana Dia telah menciptakan kamu pada permulaan (demikian pulalah kamu akan kembali kepadaNya)".

Satjipto Rahardjo⁴¹, dalam perspektif ilmu hukum, menyatakan bahwa keadilan yang disampaikan oleh banyak pakar antara lain adalah:

1. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuicue tribuendi-Ulpianus*);
2. Keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak (Aristoteles).
3. Keadilan adalah kebijakan yang memberikan hasil, bahwa setiap orang mendapatkan apa yang merupakan bagiannya (Keadilan Justinian);
4. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya, asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain (Herbert Spencer);
5. Norma keadilan menentukan ruang lingkup dari kemerdekaan individual dalam mengejar kemakmuran individual, sehingga dengan demikian

⁴¹ Dikutip sesuai dengan teks aslinya, (hanya saja tidak diambil secara keseluruhan, namun diambil bagian-bagian yang relevan dengan tulisan ini,) Dari Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 163-165.

membatasi kemerdekaan individu di dalam batas-batas sesuai dengan kesejahteraan umat manusia (John Salmond);

6. John Rawls mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yang mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki⁴².

Apa yang ditulis oleh Satjipto Rahardjo tentang keadilan tersebut menunjukkan betapa sulitnya mengartikan makna keadilan secara definitif. Makna keadilan akan berubah-ubah tergantung pihak yang menentukan isi keadilan itu termasuk di dalam faktor konteks, waktu, maupun tempatnya. Namun secara umum unsur-unsur formal tentang keadilan sesuai dengan pembagian aliran keadilan menurut Kelsen dan Rawls pada dasarnya terdiri atas⁴³:

⁴² Menurut John Rawls, subyek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban *fundamental* serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Lembaga (institusi) utama menentukan hak dan kewajiban manusia serta mempengaruhi prospek kehidupan mereka. Ini struktur dasar yang merupakan subyek utama keadilan yang efeknya begitu besar dan tampak sejak awal. Keadilan dalam skema sosial ini secara mendasar bergantung pada bagaimana hak-hak dan kewajiban fundamental diterapkan. Prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asali ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka. Mereka yang terlibat dalam kerjasama sosial memilih bersama prinsip-prinsip yang akan memberikan hak dan kewajiban dasar serta menentukan pembagian keuntungan sosial. Situasi posisi asali dianggap sebagai *status quo* yang pas, sehingga persetujuan fundamental yang dicapai di dalamnya adalah fair. Bertitik tolak dari posisi asali ini maka prinsip keadilan menurut John Rawls adalah hasil dari persetujuan tawar-menawar yang fair, dan disebut *fairness*. Disarikan dari John Rawls, *A Theory of Justice*, terjemahan: Uzair Fauzan Heru Prsetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Celeban Timur, Pustaka Pelajar, 2006), hal. 7-13.

⁴³ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007), hal. 100

1. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak)
2. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur Manfaat).

Dua unsur keadilan yaitu unsur "hak" dan unsur "manfaat", bila ditambah (dalam diskursus hukum) perihal relasi hukum itu berwujud lahiriah, tanpa mempertanyakan terlebih dahulu itikad moralnya, maka nilai keadilan di sini memiliki aspek empirik juga di samping aspek idealnya. Artinya apa yang dianggap adil dalam konteks hukum harus dapat diaktualisasikan secara konkrit menurut manfaatnya.⁴⁴ Ukuran manfaat inilah yang menunjukkan bahwa keadilan dapat dipandang sebagai aspek empirik. Seiring dengan aspek empiric ini aspek moralpun seharusnya juga mendapatkan posisi sentral dalam segala aktifitas. Keadilan yang didengung-dengungkan oleh banyak orang secara jujur sesungguhnya adalah sentuhannya terhadap hati nurani atau pikiran. Artinya terpenuhinya wujud empiris saja belum bisa dikatakan adil bila belum dilengkapi dengan aspek ideal yang menyentuh hati nurani para subyeknya. Untuk itulah menurut Majid Khadduri

⁴⁴ E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, hal.100.

sebagaimana dikutip oleh Zakyuddin Baidhawi⁴⁵ keadilan dalam Islam itu terdiri dari enam katagori.

- a. Keadilan politik, yaitu keadilan yang sesuai degan kehendak penguasa dan sering kali dipandang sebagai tujuan prinsipil dari suatu Negara. Dalam perspektif Islam segala kebijakan yang diambil oleh pemerintah haruslah bersumber dari al-Qur'an atau al-Hadits, paling tidak tidak boleh bertentangan dengan kedua sumber tersebut. Dasar pemikiran ini adalah QS. Al-Nisa' 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْۚ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِى شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۚ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۚ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), serta pemerintahmu. Jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

⁴⁵ Disarikan dan dielaborasi dari Zakiyuddin Baidhawi, 2007, *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Universal*, (Surabaya: PT Temprina Media Grafika), hal. 22-28.

- b. Keadilan teologis, yaitu keadilan yang sesuai dengan doktrin yang ditetapkan oleh para teolog sehubungan dengan sifat kehendak (iradah) Allah dan esensiNya.
- c. Keadilan filosofis, yaitu keadilan yang didefinisikan tidak sesuai (tidak berdasarkan, pen.) wahyu, tetapi dengan akal budi. Akal dalam pandang Islam memiliki posisi yang sangat penting sekali, sehingga karenanya hamper seluruh ibadah, baik wajib maupun sunah dipersyaratkan adanya akal sehat. Itulah sebabnya imam al-Nawawi⁴⁶ menyatakan:
 طوبى لمن كان عقله أميرا وهواه أسيرا وويل لمن كان هواه أميرا وعقله أسيرا (Berbahagialah orang yang akalnya sebagai pemimpin dan hawa nafsunya sebagai tawanan, serta celakalah orang yang hawa nafsunya sebagai pemimpin dan akalnya sebagai tawanan).
- d. Keadilan Etis, yaitu keadilan yang sesuai dengan kebajikankebajikan tertinggi yang menentukan suatu standar tingkah laku manusia.
- e. Keadilan legal, yaitu keadilan yang sesuai dengan hukum. Dalam Islam, hukum jalin menjalin dengan agama dan keduanya dipandang sebagai pernyataan dari kehendak Ilahi atau Keadilan. Tujuan agama adalah mendefinisikan dan menentukan tujuan-tujuan keadilan, sementara fungsi syariat adalah mengindikasikan jalan berdasarkan keadilan Alah.

⁴⁶ Al-Nawawi, 1897, *Nashaih al-Ibad*, (Al-azhar: Dar al-Kutub al-Islamiyyah), hal.13.

4. Asas Kerelaan (*al-Ridla*)

Asas kerelaan ini merupakan asas yang paling sulit dibanding dengan asas-asas lainnya. Kesulitan tersebut terletak pada aspek ukurannya. Kerelaan merupakan perbuatan hati. Tak seorangpun di dunia ini mengerti isi hati orang lain, apakah ia melakukan perbuatan didasari atas kerelaan hati atau tidak. Hal ini akan menjadi semakin sulit ketika perbuatan tersebut dikaitkan dengan persoalan politik yang kenyataannya sangat tendensius atau berafiliasi pada kepentingan. Pada hal setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah diletakkan di atas dasar kerelaan. Transaksi yang dilaksanakan tanpa dasar ini, menurut pandangan fikih muamalah (perekonomian Islam) dipandang sebagai transaksi yang batal atau tidak sah. Secara normatif pandangan ini didasari oleh QS. Al-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, karena sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat tersebut menandakan bahwa seluruh aktifitas perekonomian, apakah jual-beli ataupun lainnya, hendaklah dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak memaksa dan tidak pula dipaksa. Perbuatan apapun dalam perekonomian, khususnya

yang berkaitan dengan transaksi yang tidak sejalan dengan ketentuan ini dianggap sebagai perbuatan yang *ilegal* atau *ghairu masyru'* (tidak berdasarkan hukum) karena bertentangan dengan al-Qur'an dan al-hadits sebagai sumber hukum Islam, yang oleh karenanya perbuatan atau transaksi tersebut dinyatakan batal demi hukum. Ini membuktikan bahwa sesungguhnya setiap orang yang berbuat sesuatu seharusnya memahami aturan-aturan yang berlaku, khususnya persoalan keimanan dan akhlak yang merupakan basis atau dasar pengabdian kepada Allah SWT.

5. Asas Tertulis (al-Kitabah).

Asas ini diproyeksikan ke depan untuk megantisipasi segala kemungkinan yang akan terjadi yang tidak diinginkan berkaitan dengan permasalahan hukum antara para pihak. Dasar hukum asas ini adalah QS. Al-Baqarah: 282-283.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ
كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا
شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ
الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا
دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدِّئُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنِ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar, serta janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengikatkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengikatkan, maka hendaklah walinya mengikatkan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya, dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu" (282). "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang), akan tetapi jika sebagian

kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Barang siapa menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan" (283).

BAB III

NILAI-NILAI SYARIAH

DALAM SISTEM PEREKONOMIAN INDONESIA

A. Momentum Persaingan Sistem Ekonomi di Indonesia.

Sebuah negara dinilai sebagai negara maju, atau paling tidak sebagai negara yang memiliki stabilitas baik, dapat diukur dari dua perspektif, yaitu perspektif hukum dan perspektif ekonomi. Hukum dan ekonomi sekaligus merupakan instrument di mana suatu negara memiliki stabilitas yang kokoh dan dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya. Kendatipun ada yang berpebdapat bahwa hukum semata-mata dipandang sebagai faktor eksternal yang bermanfaat dan dapat dimanfaatkan dalam rangka mengamankan kegiatan dan tujuan ekonomi yang akan dicapai.¹ Dengan demikian hukum dan ekonomi seharusnya bisa berjalan seiring dan sejajar serta saling memberikan nilai positif antar keduanya. Perekonomian sebuah negara dianggap baik, jika ia terbukti dapat memberikan kesejahteraan masyarakatnya dalam kondisi tertib, aman, tenteram, dan damai. Sedangkan kondisi tertib, aman, tenteram, dan damai tersebut tidak mungkin terwujud tanpa adanya hukum atau aturan perundang-undangan yang memadai. Bahkan hukum akan dapat memainkan perannya tersebut bila ada dukungan oleh ekonomi perekonomian memadai pula. Keserasian hukum dan ekonomi dengan demikian bagaikan dua sisi mata uang yang baru memiliki nilai apabila keduanya berdampingan dan tidak

¹ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung, CV. Mandar Maju.), hal. 6.

terpisahkan. Terpaan gelombang globalisasi yang sangat dahsyatpun tidak akan berpotensi menggoyahkan keduanya bila keduanya dalam kondisi prima, bahkan globalisasi yang secara keseluruhan dapat disimpulkan sebagai gelombang sunami yang berpotensi membahayakan perekonomian nasional, tetapi sebenarnya ia juga bisa dilihat dari sudut pandang yang positif yaitu “mempunyai nilai manfaat yang lebih tinggi bagi kehidupan yaitu untuk mencapai kesejahteraan bersama”².

Pengalaman Indonesia sebagai negara terjajah yang relatif lama, tentu memberikan pelajaran yang sangat varian, baik dari sisi keamanan, kenyamanan, kedamaian, maupun kesejahteraan masyarakatnya. Namun demikian tidak bisa dielakkan bahwasanya di samping pait getirnya kehidupan sebagai negara terjajah, juga terdapat nilai-nilai positif yang bisa diambil dari pengalaman hidup sebagai rakyat atau negara jajahan. Nilai-nilai positif tersebut adalah tumbuh dan berkembangnya akulturasi kebudayaan dari berbagai elemen yang ada. Khususnya dalam hal merajut sinergitas perekonomian dan hukum yang memadai sebagai instrument kemajuan bangsa. Berbagai sistem perekonomian dan sistem hukum yang berkembang di tengah-tengah masyarakat berkolaborasi membentuk suatu kekuatan tersendiri dan terlembagakan dalam kehidupan, sekalipun hanya dalam tataran antropologis sosiologis saja (tidak didukung oleh kebijakan pemerintah). Tata kehidupan masyarakat seperti ini, yang secara alamiah berbasiskan agama (Islam) dan berbagai macam adat istiadat, merupakan jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia.

² Sri Redjeki Hartono, 2000. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju), hal.3.

Artinya disadari atau tidak, sesungguhnya bangsa Indonesia dalam konteks yang demikian ini sudah memiliki sistemnya sendiri, baik sistem ekonomi maupun sistem hukum yang sekalipun secara formal tidak masuk dalam sebutan nomenklatur yang mudah dikenal. Hal ini sejalan dengan pendapat madzhab sejarah yang menyatakan bahwa hakekat hukum itu sesungguhnya perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variabel sosial empirik³. Perilaku sosial empiric yang dimaksudkan di sini sudah barang tentu berupa perilaku sosial bangsa Indonesia yang dilatarbelakangi oleh ajaran agama dan adat istiadat yang secara dominan eksis pada saat itu. Frederich Karl Von Savigny selaku pelopor madzhab sejarah, menyatakan bahwa hukum tidak ditetapkan/dibuat oleh pemerintah (pihak penguasa atau otoritas) tetapi tumbuh sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang analog dengan perkembangan kebudayaan, bahasa, dan adat-istiadat masyarakat.⁴ Sementara itu ajaran agama Islam dalam kaitannya dengan adat istiadat memberikan tempat dan posisi strategis sebagai alat atau instrument dalam menata kehidupan, baik pribadi, masyarakat, maupun bernegara. Islam sebagai sandaran hidup mayoritas masyarakat Indonesia dengan kaedah fikihnya memberikan dukungan kekuatan normatif yang berbunyi *العادة محكمة* (adat istiadat itu bisa dijadikan sandaran hukum). Adat istiadat yang dimaksudkan tentunya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama itu sendiri. Kolaborasi nilai-nilai agama Islam dan adat istiadat itulah sesungguhnya yang melatarbelakangi lahirnya kebudayaan baru sebagai budaya dan

³ I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press), hal. 13.

⁴ I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, hal.13.

adat istiadat bangsa Indonesia. Budaya bangsa Indonesia yang berlatar belakang nilai-nilai agama dan adat istiadat tersebut dalam perjalanan selanjutnya sering kali berbenturan dan juga saling memberikan pengalaman dengan sistem perekonomian yang didukung oleh sistem hukum Eropa Continental yang notabene adalah hukum positif yang didesain oleh penguasa (penjajah). Benturan dan pertukaran pengalaman antar sistem yang satu dengan lainnya biasanya memberikan corak tersendiri dan melahirkan sistem yang baru yang legitimitas hidup diengah-tengah masyarakat yang sering disebut sebagai budaya modern.

Sekalipun budaya bangsa yang secara natural berbasis agama dan adat istiadat merupakan jiwa bangsa Indonesia, namun perlu disadari bahwa pemegang kekuasaan yang dalam hal ini adalah penjajah, memiliki otoritas sangat luas dalam mengendalikan sistem hukum dan perekonomian negara. Tak pelak lagi sistem perekonomian kapitalis sebagai sistem perekonomian penjajah memiliki kedudukan yang sangat kokoh dan strategis yang harus dijalankan dan dijadikan pegangan bagi seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat. Tidak ketinggalan pula sistem ekonomi sosialis, sekalipun dalam rentangan waktu yang relatif singkat, akan tetapi dalam kenyataannya pernah mengisi atau turut berkompetisi untuk merebut kekuasaan di Indonesia. Sehingga dengan demikian panggung sejarah sistem perekonomian Indonesia pernah diperebutkan oleh ketiga sistem besar tersebut. Sistem Islam sebagai jati diri alamiah bangsa Indonesia, kapitalis sebagai sistem terkuat yang diusung oleh pemerintah penjajah, dan sosialis sebagai yang pernah ikut dalam

kompetisi sekalipun tidak begitu lama. Setelah Indonesia merdeka, yang semestinya sistem perekonomian kembali kepada kepribadian bangsa Indonesia atau sistem ekonomi Islam yang berkolaborasi dengan adat Istiadat, namun dalam kenyataannya tidaklah demikian. Sistem ekonomi kapitalis terbukti masih kokoh sebagai sistem ekonomi pemerintahan yang secara implementatif juga diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia. Setidaknya ada dua bukti riil untuk memperkuat argumentasi ini, yaitu: *Pertama*, sistem perbankan yang pada saat itu (sebelum tahun 2008, yaitu sebelum lahirnya undang-undang perbankan syari'ah di Indonesia) yang seluruhnya memakai sistem bunga. *Kedua*, sistem ekonomi Islam (fikih muamalah) yang diajarkan di madrasah-madrasah dan pondok-pondok pesantren di seluruh Indonesia, hanya merupakan kajian-kajian keilmuan yang tidak bisa (sulit) diterapkan secara umum yang dikarenakan sistem perekonomian kapitalis sudah eksis di seluruh wilayah negara kesatuan Indonesia serta tidak adanya dukungan kebijakan oleh pemerintah. Hal ini bisa terjadi dikarenakan sistem hukum yang dianut oleh pemerintahan yang sah (Indonesia) adalah sistem hukum yang juga merupakan peninggalan penjajah yaitu *civil law sistem* (sistem hukum positif). Dengan demikian madzhab atau sistem perekonomian kapitalis memiliki kekuatan yang kokoh karena adanya dukungan kuat dari sistem hukum yang berlaku. Sementara sistem hukum dan sistem ekonomi lainnya tenggelam dan hidup sebagai budaya mayarakat yang tidak didukung oleh kebijakan pemerintah sehingga tidak secara dominan menguasai sektor-sektor penting dalam kaitannya dengan kebutuhan pokok sandang, pangan, dan papan yang semuanya harus dikendalikan dengan regulasi (peraturan) yang berlaku.

Setelah lebih kurang setengah abad berjalan, Indonesia mulai mengalami perubahan, baik dari sisi sistem perekonomian maupun sistem hukumnya. Yaitu dengan lahirnya Undang-Undang Nomer 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Mulai saat itulah nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, khususnya dalam perekonomian dan hukum secara perlahan mengalami banyak perubahan dengan masuknya nilai-nilai Islam. Sekalipun secara politis belum begitu dominan. Terbukti dengan adanya nama perbankan syariah yang secara internasional hanya Indonesia memakainya, sementara belahan dunia lain menggunakan nama bank Islam dengan logo IB (*Islamic Banking*). Ini semua juga tidak luput dari pergerakan politik di Indonesia dalam rangka perebutan kekuasaan melalui partai politik. Bukti dominasi suatu partai dalam ukuran tradisi ternyata tidak bisa mendongkrak partai pemerintah atau Golkar, karena memang seting dan strategi politik secara keseluruhan berada di tangan penguasa (Golkar) saat itu. Munculnya simbol-simbol keislaman mengalami distorsi karena kekhawatiran penguasa akan menguatnya partai rakyat yang dalam kenyataannya memiliki pendukung yang sangat besar. Bukti terdistorsinya simbol-simbol keagamaan yang pernah muncul dalam panggung politik Indonesia antara lain adalah digantinya simbol Ka'bah sebagai gambar Partai Persatuan Indonesia dengan gambar bintang yang secara simbolik tidak memiliki keterkaitan emosional dengan umat Islam. Selain itu nama sebuah korporasi ekonomi di bidang perbankan. Korporasi ekonomi di bidang perbankan secara internasional seluruhnya menggunakan Bank Islam atau Islamic Banking dengan logo IB, akan tetapi di Indonesia tidaklah demikian. Indonesia lebih menyukai nama atau sebutan Bank

Syariah yang secara politis terpisah dari emosi atau nilai spiritual umat Islam yang berkaitan dengan persoalan agama.

B. Pemanfaatan Momentum Persaingan Politik Ekonomi:

Di balik musibah tentu ada berkah. Perkataan ini sering kali digunakan oleh siapa saja yang selalu dirundung musibah dalam upaya menghibur diri agar tidak terlalu larut dalam musibah yang ia hadapi. Namun sekalipun demikian hal ini tidak hanya benar dalam wacana, akan tetapi benar juga secara fakta. Dalam bahasa hukum, kebenarannya bukan hanya secara *in abstracto* akan tetapi juga secara *in concreto*. Benar secara *dejure* sekaligus benar secara *difakto*. Persaingan, bahkan pertikaian ideologi kapitalis, sosialis, dan Islam, di satu sisi memang membuat terganggunya implemntasi sistem ekonomi Islam, tetapi di sisi lain juga memberikan nilai-nilai positif bagi perbaikan sistem ekonomi Islam itu sendiri. Adagium yang menyatakan رأينا صواب يجتمل الخطأ ورأي مخالفينا خطأ يحتمل الصواب (pendapat kita adalah benar tetapi mengandung kesalahan dan pendapat lawan-lawan kita adalah salah tetapi mengandung kebenaran) adalah memberikan pelajaran berharga di kala sistem perekonomian Islam dirundung musibah seperti konflik dan persaiang sebagaimana yang telah terjadi antara ketiga sistem tersebut. Secara strategis lawan politik memang harus diposisikan sebagai lawan, tetapi secara politis keberadaan dan kekuatan lawan terkadang juga bermanfaat untuk diperhitungkan sebagai kekuatan

internal. Kekuatan ekonomi kapitalis yang dalam kenyataannya banyak didukung oleh masyarakat dan kekuasaan, tentu karena nilai positifnya yang banyak mewarnai gerak langkah kehidupan masyarakat dan Negara di bidang perekonomian. Nilai-nilai positif ekonomi kapitalis maupun sosialis yang secara terus-menerus dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah, pada akhirnya menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang dilakukan oleh warga masyarakat pada akhirnya akan menjadi jiwa masyarakat itu sendiri. Tatkala kebiasaan itu sudah menjadi bagian dari jiwa masyarakat, maka ada dua hal penting yang bisa dijadikan argumentasi agar kebiasaan tersebut terarah pada kekuatan positif yang mendapat legitimasi secara akademis. Pertama adalah legitimasi ilmu hukum. Frederich Karl Von Savigny sebagai pelopor madzhab sejarah menyatakan, bahwa "hukum tidak ditetapkan/dibuat oleh pemerintah (pihak penguasa atau otoritas) tetapi tumbuh sesuai dengan sejarah perkembangan masyarakat yang analog dengan perkembangan kebudayaan, bahasa, dan adat-istiadat masyarakat.⁵ Dengan pernyataan Savigny ini jelas menunjukkan bahwa kebiasaan masyarakat Indonesia dalam bidang ekonomi kapitalis tersebut sudah menjadi legitimet karena sudah menjadi adat dan budaya mereka dalam interaksi sosial perekonomian. Kedua, Islam sebagai agama yang paling banyak penganutnya di Indonesia, dengan ajarannya yang sangat proteksionis terhadap hadirnya nilai-nilai baru yang bertentangan dengannya, tidak serta merta menolak kehadiran nilai-nilai baru tersebut masuk dalam ajaran perilaku masyarakatnya. Nilai-nilai yang masuk sebagai ajaran perilaku masyarakat Islam di mana mereka berada, dapat diterima bahkan ditetapkan sebagai

⁵ I Dewa Gede Atmadja, 2014. *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, hal.13.

hukum, manakala tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Bertitik tolak dari pernyataan ini, maka datangnya sistem perekonomian kapitalis dan sosialis yang sudah menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat Indonesia dapat dipilah menjadi dua, yaitu ajaran ekonomi yang mengandung nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam, dan ajaran ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam. Untuk ajaran ekonomi kapitalis-sosialis yang sejalan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, secara otomatis diterima sebagai ajaran agama dan tidak sedikitpun ada penolakan. Sedangkan yang kedua, yaitu yang mengandung unsur-unsur pertentangan dengan ajaran agama Islam, sepanjang dapat dimodifikasi atau dilakukan penyesuaian maka ia dapat diterima sebagai ajaran Islam dalam bidang perkeekonomian, misalnya *Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik* (IMBT) sebagai modifikasi dari *Leasing*. Ajaran Islam yang demikian ini didasari oleh kaedah fikih yang menyatakan العادة محكمة (adat-istiadat itu bisa dijadikan sandaran hukum). Artinya sekalipun sebuah perilaku itu tidak secara langsung didukung oleh dalil-dalil agama seperti al-Qur'an dan al-Hadits, tetapi keberadaannya tidak bertentangan dengan keduanya, maka perilaku (adat) tersebut tidak dianggap sebagai sesuatu yang kontra yuridis. Yang demikian itu dikarenakan al-Qur'an sebagai sumber hukum, bersifat *ijaz* (singkat atauringkas). Artinya dengan lafadz-lafadz yang sangat singkat, tetapi memiliki jangkauan yang sangat luas, yang untuk memahaminya diperlukan metode dan teori khusus untuk dapat digunakan sebagai *istimbath* (penggalian hukum) nya.

Kedua teori hukum umum dan Islam sebagaimana disebutkan di atas, memberikan penguatan akademis bahwa perilaku-perilaku ekonomi (kapitalis maupun sosialis) yang dalam rentangan waktu sangat panjang dilakukan oleh bangsa Indonesia, secara hukum dapat dikatakan sebagai hukum Indonesia dalam bidang perekonomian. Hanya saja dalam rangka menyesuaikan dengan tradisi bangsa Indonesia yang sarat dengan ajaran Islam, maka perlu diadakan penyesuaian jika ternyata terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam itu sendiri. Dengan demikian kehadiran sistem hukum ekonomi kapitalis maupun sosialis tidak menjadi penghamabat bahkan justru menjadi penguat sistem perekonomian Islam dalam rangka merespon perkembangan zaman di mana ekonomipun juga perlu berkembang sesuai perkembangan sosialnya.

C. Aktualisasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Perekonomian Indonesia.

Pada era modern ini hukum dicirikan berupa kesepakatan legislator yang melahirkan "*statutory law*" atau "*state law*" (hukum negara) yang berciri "rasional" dan "normatif"⁶. Sekalipun demikian bukan berarti hukum itu terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang menjadi dasar bagi setiap tindakan atau perilaku setiap orang, masyarakat ataupun warga negara secara luas. Sekalipun dalam konteks positivisme, di mana hukum diidentikan dengan aturan perundang-undangan tertulis, tetapi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat di mana hukum itu

⁶ I Dewa Gede Atmaja, 2013, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press), hal.27.

diimplementasikan tetap menjadi ruh hukum itu sendiri. Pengertian yang demikian ini menjadi lebih kuat dengan adanya pendapat yang menyatakan bahwa sesungguhnya hukum itu memang harus merupakan *cultur begreep* pengertian budaya⁷. Masyarakat hukum sepanjang merupakan kelompok, baik dalam pengertian masyarakat komunal maupun warga masyarakat (negara), maka dia memiliki kesamaan budaya dan gaya hidup. Sehingga aturan hukum dirasa tidak terlalu sulit dilaksanakan sebagai pedoman hidup⁸. Hukum Islam, selain yang secara konseptual menunjukkan normativitasnya berasal dari sumber ajarannya, dan dianggap sebagai suatu ketaatan dan kepatuhan bagi pemeluknya yang melaksanakan, ketaatan dan kepatuhan itu sekaligus dianggap sebagai nilai ibadah yang pahalanya pasti diberikan besuk di akhirat kelak.⁹ Sebaliknya orang yang tidak melaksanakan ajarannya kelak juga akan mendapatkan sangsi sesuai perbuatan yang dilakukan. Unsure-unsur itulah yang menguatkan Islam sebagai "agama hukum". Hukum dan teologi pada dasarnya tidak pernah bisa dipisahkan, dari teologilah institusi hukum itu dibangun dan melalui ketaatan hukum aspek teologi dapat dipertahankan.¹⁰

Persoalan yang muncul kemudian adalah bagaimana hukum Islam yang dalam kenyatannya sarat dengan nilai-nilai tersebut diaktualisasikan dalam hidup bernegara khususnya dalam masalah perekonomian yang secara empiris sudah jauh berkembang

⁷ M. Koesnoe, 1998, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Surabaya, Ubhara Press), hal. 38.

⁸ Suwandi hal. 24.

⁹ Suwandi, *Anjak-piutang dalam Pergeseran Paradigma Hukum*, 2014, Penelitian Dipa Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, Hal. 21.

¹⁰ Ratno Lukito, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras), hal.84.

sejalan perkembangan masyarakat. Untuk menjawab pertanyaan ini, hal penting yang harus diperhatikan terlebih dahulu adalah jawaban pertanyaan tentang apa sesungguhnya hukum ekonomi itu, dan siapa yang melaksanakan hukum ekonomi tersebut, serta di mana hukum ekonomi tersebut dilaksanakan. Dengan kata lain berkaitan dengan aktualisasi nilai-nilai syariah dalam perekonomian Indonesia terletak pada jawaban ketiga pertanyaan tersebut, yaitu substansi hukum ekonomi syariah, lembaga hukum ekonomi syariah, serta budaya hukum ekonomi syariah. Di ketiga ranah inilah nilai-nilai syariah seharusnya harus dituangkan. Tetapi dalam kerangka hukum Indonesia, di mana aturan hukum itu dibuat oleh badan legislasi atau DPR, maka persoalan lain yang muncul kemudian adalah dominasi anggota DPR yang kelak siap untuk mengusung nilai-nilai syariah tersebut ke dalam aturan perundang-undangan. Dengan demikian ada empat unsur atau ranah hukum di mana nilai-nilai syariah harus tersirat ataupun tersurat di dalamnya.

1. Aktualisasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Subtansi Hukum Perekonomian.

Subtansi hukum merupakan hal yang paling pokok atau esensial dalam hukum. Baik hukum sebagai ilmu maupun hukum sebagai peraturan tertulis atau pedoman berperilaku. Yang demikian itu dikarenakan sejatinya hukum itu adalah norma yang mengajak masyarakat untuk mencapai cita-cita serta keadaan tertentu, tetapi tanpa mengabaikan dunia kenyataan dan oleh karenanya ia digolongkan ke

dalam norma kultur.¹¹ Sebagai norma kultur hukum memang seharusnya dituangkan dalam peraturan tertulis dengan maksud mudah untuk dijadikan pedoman berperilaku. Hal ini akan mendapatkan kekuatan legalnya ketika hukum dikaitkan dengan positivisme hukum, di mana hukum itu merupakan produk legislator sebagaimana di jelaskan di atas.

Secara ontologis, hukum perekonomian di Indonesia sulit didikhotomikan antara hukum ekonomi konvensional dengan hukum ekonomi syariah. Sebab sekalipun secara akademis kedua entitas hukum tersebut bisa didikhotomikan, akan tetapi secara empiris ia merupakan aktifitas perekonomian yang dilakukan oleh subyek hukum tanpa bias dibedakan secara kultural. Perbedaan akademis antara hukum ekonomi konvensional dengan hukum ekonomi syariah terletak pada prinsip atau nilai yang dikandungnya. Yang demikian itu dikarenakan ekonomi syariah itu ditinjau dari segi implementasinya merupakan bagian dari pengamalan agama Islam yang harus diletakkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Sebagaimana dijabarkan pada bab sebelumnya, bahwa nilai-nilai syariah dalam ekonomi syariah itu secara garis besar dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu nilai-nilai utama (primer) yang bersifat konstitutif, dan nilai-nilai cabang (sekunder) yang bersifat regulative. Nilai konstitutif merupakan hukum dasar ekonomi syariah yang karenanya ia bersifat universal tidak terbatas pada ruang dan waktu. Sedangkan nilai-nilai regulative bersifat khusus dan keberlakuannya sering kali dibatasi oleh ruang dan waktu (selama

¹¹ Sajipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), hal. 27.

yang dimaksudkan dengan nilai regulative tersebut bukan merupakan dalil-dalil agam yang bersifat *qhath'iy*.

Nilai-nilai konstitutif sebagaimana disebutkan di atas (nilai akidah/ilahiyah, nilai syariah/fikih/hukum, dan nilai akhlak/moral), harus tertuangkan dalam substansi hukum ekonomi syariah, baik secara tersurat maupun tersirat. Begitu juga dengan nilai-nilai regulatif seperti tidak boleh ada *riba*, *gharar* /penipuan, *maisir*/perjudian/spekulatif, dan sebagainya. Keseluruhannya harus tertuang dalam substansi hukum sebagaimana aturan yang berlaku dalam perumusan perundang-undangan atau legislatif drafting. Kedua nilai konstitutif dan regulatif tersebut selanjutnya dikolaborasikan atau diekpletiskan dengan regulasi hukum ekonomi konvensional untuk selanjutnya dipergunakan sebagai peraturan hukum baik dalam konteks perundang-undangan maupun konteks dogmatik hukumnya.

2. Aktualisasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Lembaga Hukum Perekonomian.

Pengertian lembaga hukum secara luas dapat diartikan seluruh lembaga atau institusi yang memiliki kewenangan membuat aturan hukum dan atau melaksanakan substansi hukum tersebut. Dengan pengertian ini lembaga hukum dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu lembaga hukum yang bertugas atau memiliki kewenangan membuat undang-undang dan lembaga hukum yang memiliki tugas sebagai penegakan hukum. DPR adalah lembaga hukum yang memiliki kewenangan membuat undang-undang, berdasarkan UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: "Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang". Berdasarkan kewenangannya ini

setelah rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama (Pasal 20 ayat (2)). Bertitik tolak dari kedua pasal ini seakan merekomendasikan bahwa sesungguhnya substansi undang-undang tersebut sangat tergantung pada DPR dan sekaligus Presiden. Oleh karena itu keberadaan anggota DPR dan Presiden memiliki posisi strategis dalam rangka meng-*gool*-kan nilai-nilai syariah ke dalam undang-undang ataupun aturan perundang-undangan yang akan dilahirkan. Artinya baik anggota DPR maupun Presiden dalam kapasitasnya sebagai yang berwenang membuat undang-undang tersebut haruslah orang yang memiliki idealisme syariah sebagai basis undang-undang yang akan diimplementasikan di Indonesia. Hal ini sangat penting sekali mengingat bahwa DPR dalam kapasitasnya sebagai lembaga hukum memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Fungsi legislasi bersentuhan langsung dengan persoalan pembuatan undang-undang. Fungsi anggaran bersentuhan dengan persoalan perekonomian, dan fungsi pengawasan berkaitan langsung dengan implementasi undang-undang apakah eksekutif sebagai pelaksana undang-undang secara konsisten melaksanakan undang-undang tersebut sesuai prinsip-prinsip syariah yang tertuang di dalamnya.

3. Aktualisasi Nilai-nilai Syariah ke dalam Budaya Hukum Perekonomian.

Pembahasan mengenai elemen *legal culture* akan memerhatikan teori yang membedakan *formal law*, yaitu suatu perangkat norma atau aturan yang dimuat dalam perundang-undangan atau dalam kasus hukum dan *law in action*, yaitu hukum yang

sebenarnya diterapkan atau dilaksanakan oleh para pihak, pengacara, dan pengadilan.¹² *Formal law* dan *law in action* sangat menentukan keberadaan *legal culture* atau budaya hukum. Implementasi *formal law* tentang ekonomi misalnya, yang secara terus menerus dan kontinyu terjadi akan memberikan pengaruh signifikan terhadap hadirnya kultur atau budaya hukum masyarakat sebagai pihak yang berkepentingan. di sisi lain implementasi *formal law* tentang ekonomi ini sangat bergantung kepada adanya *law in action* atau kasus-kasus hukum ekonomi yang secara simultan selalu terjadi. Kejadian kasus-kasus perekonomian yang diselesaikan berdasarkan *formal law* secara berulang-ulang tersebut akan membentuk suatu budaya hukum perekonomian yang keberadaannya berpotensi sebagai instrument atau elemen pengembangan *formal law* itu sendiri. *formal law* dan *legal culture* dengan jembatan kasus-kasus atau *law in action* akan melahirkan kepentingan timbale balik antar keduanya dalam pengembangan hukum itu sendiri. Sehingga dengan demikian hukum diharapkan dapat memerankan fungsinya mewujudkan ketertiban dan ketraturan perekonomian masyarakat.

Menelisik relasi atau hubungan *formal law* dan *law in action*, di mana *formal law* (substansi hukum) sudah mengakomodir nilai-nilai syariah, baik nilai-nilai utama (primer) yang bersifat konstitutif, maupun nilai-nilai cabang (sekunder) yang bersifat regulative, besar kemungkinan akan melahirkan budaya hukum yang terwarnai dengan nilai-nilai syariah. dengan demikian keseluruhan hukum perekonomian

¹² Susan Glazebrook dalam Kusumaningtuti, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hal.210.

setelah ketiga komponen kerjasama dan berjalinkelindan mengusung atau mengatualisasikan nilai-nilai syariah pasti melahirkan hukum yang adaptip, baik ditinjau dari sudut pandang konvensional maupun syariah. adagium yang menyatakan bahwa materi muatan aturan hukum modern terpisah dari agama dan etika, yang berarti keabsahan hukum modern tidak berdasarkan moralitas atau kebenaran moral¹³ tidak akan terjadi.

¹³ A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, ed, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan), hal 369.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, dan menelaah pembahasan tentang Aktualisasi nilai-nilai Syariah dalam perekonomian Indonesia ini, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai syariah yang terdiri dari nilai utama yang diposisikan sebagai nilai konstitutif dan nilai cabang sebagai nilai regulative, berdasarkan berbagai teori dan kajian pustaka yang dipergunakan sebagai pisau analisis, maka nilai-nilai tersebut harus diaktualisasikan dalam berbagai ranah hukum. Yaitu: nilai konstitutif hukum ekonomi syariah dikolaborasikan dengan nilai konstitutif hukum ekonomi konvensional tanpa memandang tempat dan waktu di mana hukum ekonomi tersebut diimplementasikan. Sedangkan nilai-nilai regulatif bersifat luwes dalam arti ketergunaannya menyesuaikan dengan ruang dan waktu di mana hukum ekonomi tersebut diimplementasikan. Secara rinci nilai-nilai syariah tersebut harus tertuang dalam substansi hukum, lembaga hukum, dan budaya hukumnya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan Aktualisasi nilai-nilai Syariah dalam perekonomian Indonesia ini, disarankan bahwa untuk dapat mengimplementasikan nilai-nilai syariah ke dalam ranah perekonomian Indonesia haruslah ada upaya serius dari seluruh subyek hukum. Baik Dewan Perwakilan Rakyat sebagai yang berwenang membuat

undang-undang, eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, maupun warga masyarakat khususnya umat Islam sebagai pihak yang menggunakan nilai-nilai syariah sebagai fasilitas kegiatan perekonomian.

Daftar Pustaka

- Ade Maman Suherman, 2006, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada).
- A.A.G. Peters dan Koesriani Siswosoebroto, ed, 1988, *Hukum dan Perkembangan Sosial Buku Teks Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan).
- Al-Nawawi, 1897, *Nashaih al-Ibad*, (Al_azar: Dar al-Kutub al-Islamiyyah).
- E. Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan, Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, (Jakarta, Penerbit Buku Kompas, 2007).
- Fathurrahman Djamil, 2001, *Hukum Perjanjian Syariah, dalam Mariam Darus Badruzaman, Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung, Citra Aditya Bakti).
- Gordon Graham, *Eigh Theories of Ethics*, terjemahan, Irfan M Zakkie, 2015, *Teori-Teori Etika*, (Bndung: Nusamedia).
- I Dewa Gede Atmadja, 2014, *Filsafat Hukum Dimensi Tematis dan Historis*, (Malang: Setara Press).
- Jonh Rawl, *A Theory of Justice*, terjemahan: Uzair Fauzan Heru Prsetyo, *Teori Keadilan, Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, (Celeban Timur, Pustaka Pelajar, 2006).
- Johny Ibrahim *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006) .
- M. Arifin Hamid, *Hukum Ekonomi Islam (Ekonomi Syariah) di Indonesia Aplikasi dan Prospeknya*, (Bogor: Galia Indonesia, 2007).
- Mulyana, 2004, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta).
- Muhammad, 2006, *Dialektika Pemahaman Nilai-Nilai Syariah dengan Perilaku Ekonomi Komunitas Bank Syariah di Malang* (Disertasi: Universitas Negeri Malang, Disertasi)
- Motesquieu, *The Spirit of Law*, 1977, *Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, terjemhan M. Khoiril Anam, (Bandung: Nusa Media).
- M. Koesnoe, *Kedudukan dan Tugas Hakim Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, (Surabaya: Ubhara Press, 1998).

- Philipus Mandiri Hadjon, "*Pengkajian Ilmu Hukum, dalam Pelatihan Metode Penelitian Hukum Normatif*", Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Lembaga Penelitian Universitas Airlangga Bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1-1 Juni 1997.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas, 2010).
- Kusumaningtuti, 2009, *Peranan Hukum dalam Penyelesaian Krisis Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Prenada Media, 2005).
- Ratno Lukito, 2008, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras),
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Mandar Maju, 2000).
- Soerjono soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan singkat*, (Jakarta, Rajawali Press, 1985).
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Bandung CV. Utomo, 2009)
- Soerjono Soekanto, 1990, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press).
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas).
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2000).
- Sulaiman al-Asyqar, 1984, *Al-Aqidah Fi Allah*, (Kuwait: Maktabah al-Falah).
- Sri Redjeki Hartono *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung, CV. Mandar Maju, 2000).
- Suwandi, *Anjak-piutang dalam Pergeseran Paradigma Hukum*, 2014, Penelitian Dipa Fakultas Syariah UIN Maliki Malang.
- Vegitya Ramadhani Putri, *Hukum Bisnis Konsep dan Kajian Kasus Kajian Perbandingan Hukum Bisnis Indonesia, Uni Eropa, dan Amerika Serikat*, (Malang: Setara Press, 2003).
- Wahbah al-Zuhaili, 1986, *Ushul al Fiqh al-Islamy*, (Damaskus: Dar al-Fikr).

Warkum Sumitro, 2005, *Perkembangan Hukum Islam, di Tengah Kehidupan Sosial Politik di Indonesia*, Malang, Bayumedia Publishing.

Yusuf Qardhawi, *Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam*, terjemahan Didin Hafifuddin dkk., 1987, (Jakarta: Rabbani Press).

Zakiyuddin Baidhawi, 2007, *Rekonstruksi Keadilan, Etika Sosial Ekonomi untuk Kesejahteraan Universal*, (Surabaya: PT Temprina Media Grafika),

UUD 1945.

Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, edisi kedua, diterbitkan atas kerjasama Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama' Indonesia dan Bank Indonesia.